



TAHUN 2022

# LKJIP INDRAGIRI HILIR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

**DISUSUN OLEH**

**BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. INHIL**

# KATA PENGANTAR

**P**uji syukur kehadiran Allah Azza Wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 dapat diselesaikan kami selesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selama Tahun 2021. Pertanggungjawaban kinerja ini menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian kinerja dalam mewujudkan visi, misi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Tentunya Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara bertanggung jawab dalam keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tembilahan, Februari 2022

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H. Muhammad Wardan'.

**H. MUHAMMAD WARDAN**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

**P**emerintah Kabupaten Indragiri Hilir selalu berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi pada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Salah satu upaya dalam mewujudkan prinsip tata kelola yang baik yaitu dengan penerapan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak hanya sekadar alat akuntabilitas, akan tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, sebagaimana juga diterbitkannya Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Target Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir periode 2018-2023 telah ditetapkan 8 misi, 8 tujuan, 11 sasaran strategis dan 28 indikator kinerja.

Adapun pencapaian kinerja yang tertuang dalam Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023, yaitu :

**Misi 1** : Memantapkan tata kelola pemerintah yang makin responsif, partisipatif, inovatif efektif dan berketepatan hukum.pada Tahun 2021 sebesar **121,25 %** yang diukur berdasarkan Tujuan/sasaran strategis tingkat Rata-rata dari Indikator :

1. Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)
2. Nilai AKIP (Predikat)
3. Nilai LPPD (Nilai)
4. Opini BPK Atas LKPD (Predikat)
5. Nilai Keterbukaan Informasi (Nilai)
6. Rata-rata Capaian Indeks Pelayanan Publik (Predikat)

**Misi 2** : Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Tahun 2021 sebesar **76,95 %** yang diukur berdasarkan tujuan/sasaran strategis tingkat Rata-rata dari Indikator :

1. Persentase Peningkatan Mobilitas Barang dan Orang
2. Rata-rata Capaian Pelayanan Infrastruktur Wilayah
3. Persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik

**Misi 3 :**Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat Tahun 2021 sebesar **105,38** % yang diukur berdasarkan tujuan/sasaran tingkat Rata-rata :

1. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)
2. Indeks Inovasi Daerah
3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

**Misi 4 :**Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing meningkatkan iman dan taqwa. Tahun 2021 sebesar **96,85** % yang diukur berdasarkan Tujuan/sasaran tingkat Rata-rata dari Indikator:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
3. Harapan Lama Sekolah (Tahun)
4. Angka Harapan Hidup (Tahun)

**Misi 5 :**Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan Tahun 2021 sebesar **103,64** % yang diukur berdasarkan Tujuan/sasaran tingkat Rata-rata dari Indikator :

1. Persentase Desa Berstatus Maju Dalam IDM Terhadap Total Desa
2. Partisipasi Lembaga Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%)
3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

**Misi 6 :**Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan social Tahun 2021 sebesar **77,59** % yang diukur berdasarkan Tujuan/sasaran tingkat Rata-rata dari Indikator:

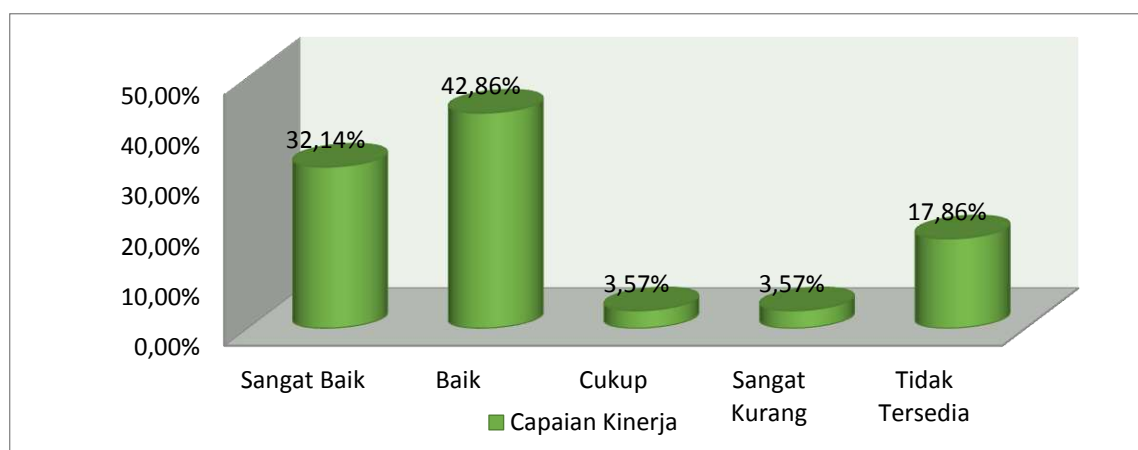
1. Persentasi Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial
2. Angka Pelanggaran Trantibmas
3. Angka Konflik
4. Persentase Resiko Bencana pada KRB

**Misi 7 :**Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran Tahun 2021 sebesar **95,76%** yang diukur berdasarkan Tujaan/sasaran tingkat Rata-rata :

1. Persentase Penduduk Miskin (%)
2. Rata-rata Pendapatan Penduduk Miskin (Perbulan\ Kapita)

**Misi 8 :** Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah Tahun 2021 sebesar **316,44** % yang diukur berdasarkan Tujuan/sasaran tingkat Rata-rata dari Indikator :

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Nilai Investasi Daerah (Rp.Milyar)



Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 ditetapkan 11 sasaran dengan 28 indikator sasaran, hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

- ❖ Terdapat **8 (sembilan) atau 28.57%** Indikator Kinerja kategori **sangat baik**, yaitu :
  - 1) Nilai Keterbukaan Informasi
  - 2) Indeks Inovasi Daerah
  - 3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
  - 4) Partisipasi Lembaga Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
  - 5) Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial
  - 6) Angka Konflik
  - 7) Rata-rata Pendapatan Penduduk Miskin
  - 8) Nilai Investasi Daerah
  
- ❖ Terdapat **11 (sebelas) atau 39.29%** Indikator Kinerja kategori **baik**, yaitu :
  - 1) Rata-rata Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Wilayah
  - 2) Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik
  - 3) Persentase Peningkatan Mobilitas Barang dan Orang
  - 4) Indeks Pembangunan Manusia
  - 5) Laju Pertumbuhan PDRB
  - 6) Rata-rata Lama Sekolah
  - 7) Harapan Lama Sekolah
  - 8) Angka Harapan Hidup
  - 9) Persentase Desa Berstatus Maju dalam IDM terhadap total Desa
  - 10) Persentase Penduduk Miskin
  - 11) Laju Pertumbuhan Ekonomi
  
- ❖ Terdapat **2 atau 7.14 %** indikator kinerja kategori cukup, yaitu :
  - 1) Persentase Jumlah Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik
  - 2) Angka Pelanggaran Trantibmas
  
- ❖ Terdapat **1 (satu) atau 3.57 %** indikator kinerja kategori sangat kurang, yaitu :
  - 1) Persentase Resiko Bencana pada KRB
  
- ❖ Terdapat **6 (lima) atau 21.43%** Indikator Kinerja **belum didapatkan capaian kinerjanya** dikarenakan realisasi kinerja masih belum dirilis oleh beberapa Kementerian dan BPS untuk tahun 2021 yaitu :
  - 1) Indeks Reformasi Birokrasi
  - 2) Nilai AKIP
  - 3) Nilai LPPD
  - 4) Opini BPK atas LKPD
  - 5) Rata-rata Capaian Pelayanan Publik
  - 6) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Berkenaan dengan ketercapaian indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana diatas, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Bupati Indragiri Hilir Tahun 2021 dapat dipenuhi sesuai harapan dengan total tingkat persentase ketercapaian sebesar **86.36%** atau kategori **Baik**. Namun demikian masih ada beberapa indikator kinerja yang belum diketahui dan belum tercapai.

# Daftar Isi

---

---

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>.....</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>.....</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
Latar Belakang.....	2
Kondisi Geografis .....	3
Kondisi Demografis .....	4
Pertumbuhan Ekonomi.....	6
Kondisi Pemerintahan.....	7
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
Rencana Strategis Kab. Inhil Tahun 2018-2023.....	12
Indikator Kinerja Utama Kab. Inhil Tahun 2018-2023.....	24
Perjanjian Kinerja Bupati Indragiri Hilir Tahun 2021.....	28
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
Capaian Kinerja Pemkab Inhil Tahun 2021 .....	31
Analisis Capaian Kinerja Pemkab Inhil Tahun 2021.....	39
Akuntabilitas Anggaran Pemkab Inhil Tahun 2021 .....	104
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>118</b>
<b>LAMPIRAN PK.....</b>	<b>122</b>
<b>LAMPIRAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....</b>	<b>125</b>

## Daftar Tabel

Tabel 2.1 Matrik Hubungan antara Visi,Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 .....	16
Tabel 2.2 Hubungan antara Visi,Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 .....	20
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 .....	25
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.....	28
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.....	32
Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 .....	34
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 .....	35
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Memantapkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.....	39
Tabel 3.5 Komponen Penilaian .....	40
Tabel 3.6 Hasil Survei .....	42
Tabel 3.7 Hasil Penilaian Kemenpan RB.....	48
Tabel 3.8 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2019 .....	49
Tabel 3.9 Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi Riau Perkategori Tahun 2021.....	53
Tabel 3.10 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2019-2021 Kabupaten Indragiri Hilir.....	54
Tabel 3.11 Kategorisasi Penilaian Kepatuhan Pemerintah Daerah berdasarkan Ombudsman RI.....	56
Tabel 3.12 Penilaian Kepatuhan pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.....	56
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Meningkatnya Konektifitas & Aksesibilitas Antarwilayah .....	57
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Mobilitas Barang dan Orang ....	58
Tabel 3.15 Data Kapal yang terdaftar Sesuai Jenis Kapal (GT.1-GT.6).....	59

Tabel 3.16 Data Penumpang Angkutan Udara di Kabupaten Indragiri Hilir .....	59
Tabel 3.17 Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2021 .....	61
Tabel 3.18 Penganggaran Pembangunan Jalan Tahun 2021 .....	61
Tabel 3.19 Capaian Kinerja Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik	61
Tabel 3.20 Kondisi Jembatan Kabupaten Tahun 2021.....	62
Tabel 3.21 Penganggaran Pembangunan Jembatan dan Rehabilitasi Jembatan Tahun 2021 .....	62
Tabel 3.22 Capaian Kinerja Persentase Jumlah Jembatan Kabupaten dalam Kondisi baik.....	63
Tabel 3.23 Capaian Kinerja Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam yang lebih Produktif dan Berwawasan Lingkungan .....	63
Tabel 3.24 Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan .....	64
Tabel 3.25 Skor dan Kategori Indeks Inovasi Daerah tahun 2021 .....	68
Tabel 3.26 Capaian indikator Sasaran Strategis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 – 2021.....	77
Tabel 3.27 Prediket Penilaian IKLH .....	78
Tabel 3.28 Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup .....	79
Tabel 3.29 Capaian Kinerja Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing .	80
Tabel 3.30 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia .....	81
Tabel 3.31 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Rata-rata Lama Sekolah .....	82
Tabel 3.32 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah.....	84
Tabel 3.33 Capaian Kinerja Indikator Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat ...	85
Tabel 3.34 Capaian Kinerja Indikator Meningkatkan Efektifitas Program DMIJ Plus Terintegrasi .....	88
Tabel 3.35 Capaian Kinerja Mewujudkan Kerukunan, Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Sosial .....	91



Tabel 3.36 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas Sosial.....	93
Tabel 3.37 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Angka Pelanggaran Trantibmas .....	94
Tabel 3.38 Capaian Kinerja Meningkatkan Penanggulangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran .....	98
Tabel 3.39 Capaian Kinerja Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Rakyat Berbasis Sektor .....	101
Tabel 3.40 Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	102
Tabel 3.41 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Investasi Daerah.....	103

LKJIP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2021

# ***BAB I***

## PENDAHULUAN



*CONSIST OF:*

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Kondisi Geografis
- 1.3 Kondisi Demografis
- 1.4 Pertumbuhan Ekonomi
- 1.5 Kondisi Pemerintahan



## 1.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban yang Peruntutannya, yakni mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas ditetapkan melalui media pertanggungjawaban. Pelaksanaannya sendiri, dilangsungkan secara periodik. Keterkaitan akuntabilitas dengan penyelenggaraan pemerintahan ialah akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.



### 1.1.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum Sebagaimana telah kita ketahui, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Artinya, menyusun laporan tersebut secara “Benar” dan “Tepat” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tanggungjawab setiap instansi pemerintah. Hal ini merujuk pada aturan-aturan yang ada sebagai dasar atau pijakan hukum antara lain, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Peberantasan Korupsi.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

## 1.2 KONDISI GEOGRAFIS



Kabupaten Indragiri Hilir adalah Salah Satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau dan terletak di bagian selatan Provinsi Riau. Secara astronomis terletak antara 0° 36' LU dan 1° 07' LS, dan antara 102° 32' BT dan 104° 10' BT. Kabupaten Indragiri Hilir berbatasan langsung dengan Kabupaten Indragiri Hulu di sebelah Barat, Kabupaten Pelalawan di sebelah Utara, Provinsi Kepulauan Riau di sebelah Timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi di sebelah Selatan. Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah 11.605,97 km<sup>2</sup>. Sebagian besar dari wilayah Kabupaten Indragiri Hilir bila ditinjau dari segi topografi merupakan daerah

daratan rendah dengan ketinggian rata-rata <5 meter dari permukaan laut yang mengakibatkan daerah ini menjadi daerah rawa beriklim tropis basah. Akan tetapi terdapat desa-desa yang merupakan daratan tinggi. Desa-desa tersebut terletak di Kecamatan Kemuning dan Keritang.



Kategori	2019	2020
Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020 (jiwa)	740.598	654.909
Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	52,47	48,42
Seks Rasio (%)	108,18	107,7
Penduduk Menurut Kelompok Umur		
0-14 tahun	207.975	171.801
15-64 tahun	503.008	454.436
> 65 tahun	29.615	28.672

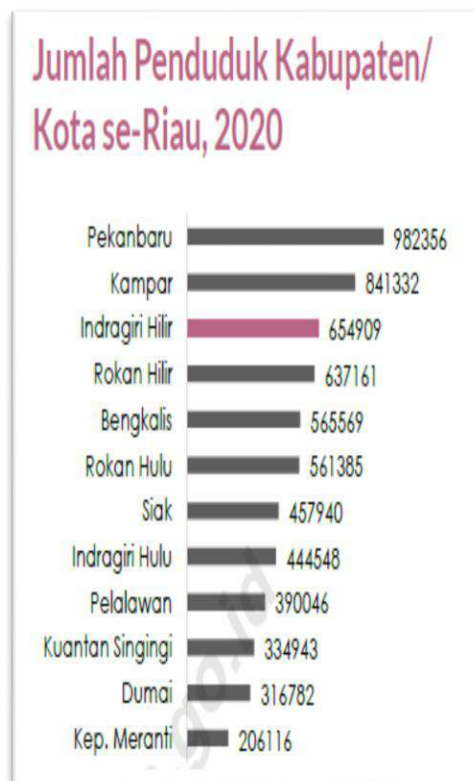
Secara administratif, Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 Kecamatan dan 197 Desa dan 39 Kelurahan. Dari 20 Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Mandah merupakan Kecamatan terbesar dengan luas 1.479.24 km<sup>2</sup>, dan Sungai Batang dengan Kecamatan terkecil dengan luas 145.99km<sup>2</sup>. Kabupaten Indragiri Hilir dikenal dengan negeri seribu parit. Kabupaten ini sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, dimana sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya dengan menggunakan kendaraan *speed boat*, pompon, dan perahu.

Rata-rata curah hujan selama tahun 2020 adalah 179,9 mm, dimana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November yaitu sebesar 263,2 mm dan terendah pada bulan Februari yaitu 98 mm. Sedangkan rata-rata hari hujan selama tahun 2020 adalah 10 hari perbulan, dimana rata-rata hari hujan tertinggi terjadi pada bulan September dan November sebanyak 13 hari dan terendah terjadi pada bulan Februari sebanyak 7 hari.

### 1.3 KONDISI DEMOGRAFIS

Kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui guna pengambilan kebijakan pembangunan. Padatnya penduduk dalam suatu wilayah dapat dijadikan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah, maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pemabangunan.

Apabila dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan soial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan manajemen kependudukan yang dapat mengembangkan potensi dan menanggulangi permasalahan yang ditimbulkan oleh penduduk itu sendiri.

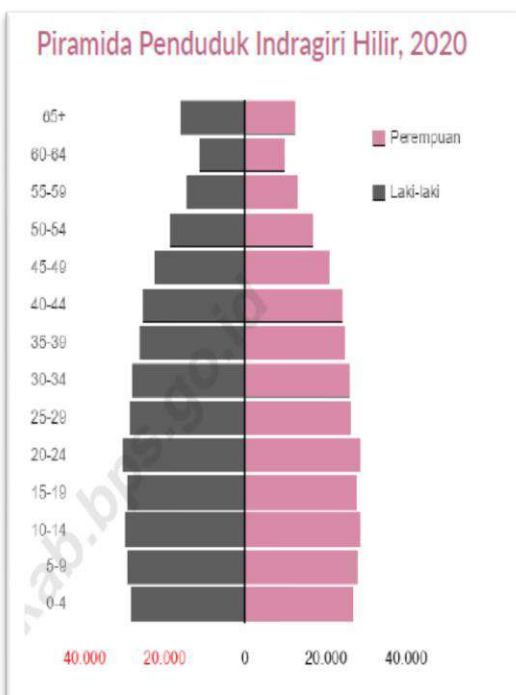




Dari Data hasil proyeksi penduduk yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir hasil Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 654.909 jiwa yang menempati urutan ketiga terpadat di Riau setelah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Dengan luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir seluas 11.605,97 km<sup>2</sup>, maka secara rata-rata 48 jiwa akan tersebar di setiap kilometer persegi. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir di tahun 2020 sebesar -0,10 persen.



Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan yang menambah serta kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Secara terus menerus jumlah penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi-bayi yang dilahirkan, dan disaat yang bersamaan pula akan dipengaruhi oleh kematian penduduk yang terjadi di setiap kelompok umur penduduk. Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2020 masih lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Indragiri Hilir di tahun 2020 sebesar 107,7 menandakan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 107 penduduk laki-laki. Berdasarkan grafik piramida penduduk, penduduk Indragiri Hilir di tahun 2020 termasuk dalam ciri penduduk ekspansif. Ditandai dengan masih melebarnya bidang piramid pada kelompok umur muda, mulai bertambahnya bidang pada kelompok usia.



Penduduk usia produktif adalah Penduduk Menurut Kelompok umur berada pada usia 15-64 tahun. Penduduk usia produktif di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020 sebanyak 68,04 persen. Penduduk usia produktif laki-laki (68,17 persen) hampir berimbang dengan penduduk usia produktif perempuan (67,91 persen).

Penduduk Usia Produktif sering kali disebut dengan suatu bonus demografi dan akan sangat menguntungkan dan meningkatkan peluang bagi suatu daerah untuk merangsang pertumbuhan produktivitas penduduk. Bonus demografi diartikan secara sederhana merupakan peluang yang dinikmati suatu Negara/wilayah sebagai akibat



besarnya proporsi produktif. Indonesia akan menikmati era bonus demografi pada tahun 2020-2035, dimana usia produktif diproyeksikan mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk. Akan tetapi Hal ini juga merupakan suatu Tantangan bagi Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal pembangunan dan lapangan pekerjaan. Kedepannya diperlukan pembangunan yang lebih besar lagi akibat semakin bertambahnya jumlah penduduk tiap tahunnya dan kebutuhan lapangan pekerjaan. Untuk itu diperlukan kebijakan yang tepat sehingga tekanan penduduk yang semakin besar tidak memunculkan konflik sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi lingkungan, dan kurangnya tingkat dukungan ketersediaan infrastruktur yang layak.

#### 1.4 PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pada Tahun 2020, Kondisi Perekonomian Nasional mulai melambat. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari adanya wabah covid-19 yang menyerang seluruh wilayah di Indonesia bahkan dunia. Akibat dari pandemi covid-19 pertumbuhan ekonomi tidak bisa berkembang. Kondisi perekonomian di tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan 2021



Hal ini dikarenakan, adanya aturan pembatasan-pembatasan wilayah dan sosial yang menghalangi terjadinya transaksi perekonomian. Hal ini membuat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk memaksakan perubahan target dari sebelum pandemi. Perubahan

target di saat ini dimulai dari *low scenario* persen dan *high scenario* persen. Dengan berpengaruhnya pertumbuhan ekonomi secara global, tentu juga mempengaruhi tingkat kemiskinan khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir, dimana terjadi peningkatan yang signifikan pada angka kemiskinan tersebut. Disamping itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami peningkatan di tahun 2020 ini. Tingkat pengangguran tentu lebih meningkat dibandingkan tahun 2019 yang lalu. Dibatasinya seluruh aktivitas saat ini dengan cara *Work From Home (WFH)* bahkan penutupan aktivitas perekonomian yang juga banyak terjadinya pemutusan hubungan kerja. Data dari BPS menyebutkan bahwa tingkat pengangguran di Wilayah Riau tahun 2020 ini meningkat menjadi 6,32 persen. Lebih tinggi dari tahun 2019 yakni sebesar 5,76 persen.



Oleh karena itu, perlu adanya perubahan strategi dalam menaikkan kembali pertumbuhan ekonomi kedepan. Saat ini berbagai aturan pun telah dibuat dalam rangka memulihkan kembali perekonomian. Kabupaten Indragiri Hilir disamping tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam berbagai aktivitas, beberapa strategi dilakukan dengan fokus utama saat ini menggesa pertumbuhan ekonomi, sebab sektor ini berkaitan langsung dengan upaya mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ekonomi warga akan menjadi pondasi kuat dalam proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir terus ditingkatkan dari berbagai sektor yang bergerak bersama-sama, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, barang dan jasa hingga pariwisata. Disamping itu, masyarakat dan swasta memiliki peran besar dalam menggerakkan roda industri dan proses kreatif di masyarakat.

### **1.5 KONDISI PEMERINTAHAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu:

1. Sekretariat Daerah Tipe A, merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
2. Sekretariat DPRD Tipe A, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Inspektorat Daerah Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Dinas Daerah, terdiri dari :
  - a. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
  - b. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
  - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.





- f. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
- g. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- h. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
- i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- j. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- m. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- n. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
- o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- p. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- q. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan, dan olahraga, dan bidang kebudayaan.
- r. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
- s. Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- t. Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan lingkup bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan ketahanan pangan.
- u. Dinas Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian lingkup bidang perkebunan.



- v. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.

5. Badan Daerah, terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.
- b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan lingkup bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.
- c. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

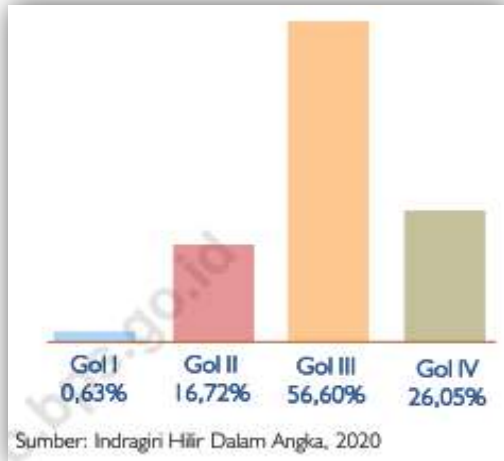
6. Kecamatan, terdiri dari :

- a. Kecamatan Tembilahan Tipe A.
- b. Kecamatan Tembilahan Hulu Tipe A.
- c. Kecamatan Tempuling Tipe A.
- d. Kecamatan Batang Tuaka Tipe A.
- e. Kecamatan Concong Tipe A.
- f. Kecamatan Enok Tipe A.
- g. Kecamatan Gaung Tipe A.
- h. Kecamatan Gaung Anak Serka Tipe A.
- i. Kecamatan Kateman Tipe A.
- j. Kecamatan Kempas Tipe A.
- k. Kecamatan Kemuning Tipe A.
- l. Kecamatan Keritang Tipe A.
- m. Kecamatan Kuala Indragiri Tipe A.
- n. Kecamatan Mandah Tipe A.
- o. Kecamatan Pelangiran Tipe A.
- p. Kecamatan Reteh Tipe A.





- q. Kecamatan Sungai Batang Tipe A.
- r. Kecamatan Tanah Merah Tipe A.
- s. Kecamatan Pulau Burung Tipe A.
- t. Kecamatan Teluk Belengkong Tipe A.



Berdasarkan Data Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2021, Pembagian wilayah administrasi Pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami Perubahan Khususnya di Tingkat RT. Terdapat 20 kecamatan, 197 desa, 39 kelurahan, serta 4.626 wilayah Satuan Lingkungan Setempat yang berbentuk RT. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi andalan dalam menjalankan roda pemerintahan mengalami sedikit perubahan jumlah dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat dari jenis kelamin, PNS perempuan masih

mendominasi sebesar 56,21 persen dan PNS berjenis kelamin laki-laki sebesar 43,78 persen. Dilihat dari tingkat pendidikan, PNS pada lingkungan Pemda Kabupaten Indragiri Hilir sebagian besar berpendidikan sarjana yaitu sebesar 60,53 persen dan yang paling sedikit adalah PNS yang berpendidikan di bawah SLTA sebesar 0,85 persen di tahun 2019. Hal ini diharapkan mampu berkorelasi positif pula terhadap peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Peraturan daerah (Perda) adalah instrument hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah dan ditetapkan setelah mendapat persetujuan DPRD. Jumlah perda yang dihasilkan oleh DPRD bisa menjadi salah satu indikator kinerja. Pada tahun 2020, DPRD Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan 9 perda, bertambah dibandingkan tahun 2019 sebanyak 6 perda. Jumlah Perda di tahun 2020 masih

**Jumlah Keputusan DPRD Menurut Jenis Keputusan, 2018-2020**

Tahun	Peraturan Daerah	Keputusan DPRD	Keputusan Pimpinan
2018	19	17	1
2019	6	12	3
2020	9	12	2

Sumber: Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021

jauh lebih sedikit dibandingkan di tahun 2018 yaitu sebanyak 19 perda. Perda yang dihasilkan diharapkan bisa menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah. Diharapkan tidak hanya aspek kuantitas perda yang ditingkatkan, melainkan juga kualitas perda yang dihasilkan harus bias menangkap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah. Dari hasil pemilihan legislatif tahun 2020, DPRD Kabupaten Indragiri Hilir periode 2019-2024 tampaknya



belum bisa merealisasikan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam keanggotaannya. Dari 45 jumlah total anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang baru dilantik, hanya ada 5 orang perempuan, atau sebesar 11 persen saja. Untuk itu, setiap partai politik diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas maupun kuantitas kader perempuannya agar keterwakilan perempuan di lembaga legislatif bisa terjaga sesuai dengan amanat Undang-Undang. Secara umum Partai Golongan Karya masih menguasai DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dengan total 9 kursi dari total 45 kursi. Sementara PKB dan PDIP ada di urutan kedua dengan total 6 kursi.

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kebangkitan Bangsa	6	-	6
Golongan Karya	7	2	9
PDI Perjuangan	5	1	6
Persatuan Pembangunan	4	1	5
Demokrat	4	-	4
Keadilan Sejahtera	3	-	3
Amanat Nasional	1	-	1
Bulan Bintang	1	1	2
Hanura	1	-	1
Gerindra	5	-	5
Nasdem	3	-	3
<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>45</b>

Sumber: Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021

LKJIP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2021

## ***BAB II***

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



*CONSIST OF:*

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021



## 2.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembayaran.

### 2.1.1 Visi

Berdasarkan kondisi Kabupaten Indragiri Hilir dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, pasangan H.MUHAMMAD WARDAN (Bupati)-H.SYAMSUDDIN UTI (Wakil Bupati) membuat Visi Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 sebagai berikut :

**"KEJAYAAN INDRAGIRI HILIR YANG SEMAKAKIN MAJU, BERMARWAH  
DAN BERMARTABAT"**



Penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

- **KEJAYAAN INDRAGIRI HILIR** artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna positif bagi seluruh warga Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seraya senantiasa mengharapakan ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
- **SEMAKIN MAJU** berarti melanjutkan pembangunan yang nyata hasilnya dan benar-benar dirasakan manfaatnya baik dalam pembangunan infrastruktur dasar, sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan perbaikan kesejahteraan rakyat yang semakin lebih baik, lebih merata dan berkeadilan, di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan, di desa ataupun kelurahan dan meliputi seluruh wilayah kabupaten, sehingga tercapai pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih berdaya saing positif dan makin diperhitungkan sebagai salah satu barometer pembangunan daerah Kabupaten di Indonesia.
- **BERMARWAH** pengertiannya pemimpin dan rakyat Indragiri Hilir terus bergerak bersama, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela dan berkarya untuk negeri, bersama-sama dengan spirit yang terus bergelora, berkarya nyata untuk Berjaya dan saling jaga menjaga kebanggaan positif pada daerahnya Kabupaten Indragiri Hilir tercinta.
- **BERMARTABAT** artinya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang manusiawi dan berkeadilan sosial yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat Indragiri Hilir, pelayanan publik yang responsive, berdemokrasi secara sehat, tidak ada diskriminasi, rakyatnya hidup rukun, tentram dan berbahagia dalam ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

### 2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir terpilih, maka ditetapkan misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah, maka ditetapkan 8 (delapan) misi sebagai berikut :

- 1) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketaatan hukum.
- 2) Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah.



- 3) Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat.
- 4) Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing, serta meningkatkan iman dan taqwa.
- 5) Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
- 6) Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial.
- 7) Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
- 8) Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

### 2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan menjadi penentu kualitas kinerja pembangunan daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir serta telah diterbitkannya Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Target Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, maka ditetapkan 8 (delapan) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran kinerja sebagai berikut :

- **Tujuan 1** : Memantapkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan **Indikator Kinerja**: Indeks Reformasi Birokrasi.  
**Sasaran 1** : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel, dengan **Indikator Kinerja** : Nilai AKIP, Nilai LPPD, dan Opini BPK atas LKPD.  
**Sasaran 2** : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dengan **Indikator Kinerja** : Nilai Keterbukaan Informasi, dan Rata-rata capaian pelayanan publik.
- **Tujuan 2** : Memantapkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, dengan **Indikator Kinerja** : Rata-rata persentase capaian pelayanan infrastruktur wilayah.  
**Sasaran 1** : Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah, dengan **Indikator Kinerja** : Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, Persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik, dan Persentase peningkatan mobilitas barang dan orang.
- **Tujuan 3** : Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang lebih produktif dan berwawasan lingkungan, dengan **Indikator Kinerja** : Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.





**Sasaran 1** : Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, industry dan pariwisata terhadap perekonomian daerah melalui pengembangan inovasi, dengan **Indikator Kinerja** : Indeks inovasi daerah. **Sasaran 2** : Meningkatnya Mutu Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. **Indikator Kinerja** : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

- **Tujuan 4** : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, dengan **Indikator Kinerja** : Indeks Pembangunan manusia.

**Sasaran 1** : Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing, beriman dan bertaqwa, dengan **Indikator Kinerja** : Rata-rata lama sekolah, dan Harapan lama sekolah.

**Sasaran 2** : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan **Indikator Kinerja** : Angka harapan hidup.

- **Tujuan 5** : Meningkatnya efektivitas program DMIJ Plus Terintegrasi, dengan **Indikator Kinerja** : Persentase desa berstatus maju dalam IDM terhadap total desa.

**Sasaran 1** : Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa, dengan **Indikator Kinerja** : Partisipasi lembaga masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat, dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

- **Tujuan 6** : Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial, dengan **Indikator Kinerja** : Persentase penanganan gangguan stabilitas dan ketertiban sosial.

**Sasaran 1** : Terwujudnya stabilitas trantibumlinmas yang kondusif, dengan **Indikator Kinerja** : Angka pelanggaran trantibmas, Angka konflik, dan Persentase resiko bencana pada KRB.

- **Tujuan 7** : Meningkatnya penanggulangan tingkat kemiskinan dan pengangguran, dengan **Indikator Kinerja** : Persentase penduduk miskin.

**Sasaran 1** : Meningkatnya pendapatan penduduk miskin, dengan **Indikator Kinerja** : Rata-rata pendapatan penduduk miskin.

- **Tujuan 8** : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi rakyat berbasis sektor unggulan, dengan **Indikator Kinerja** : Pertumbuhan ekonomi.

**Sasaran 1** : Meningkatnya investasi daerah, dengan **Indikator Kinerja** : Nilai investasi daerah.



**Tabel 2.1**  
**Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023**

<b>VISI : UNTUK KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT</b>				
<b>MISI 1 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsive, partisipatif, inovatif, efektif dan berkeajaan hukum</b>				
<b>No</b>	<b>TUJUAN/SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Memantapkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B
1.1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	1. Nilai AKIP 2. Nilai LPPD 3. Opini BPK atas LKPD	Nilai/ Predikat Nilai Prediket	B Sangat Tinggi WTP
1.2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Keterbukaan informasi 2. Rata-rata Capaian Pelayanan Publik	Nilai Prediket	80 B
<b>MISI 2 : Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah</b>				
2	Memantapkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	1. Rata-rata persentase capaian pelayanan infrastruktur wilayah	Persentase	68,39
2.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah	2. Persentase peningkatan mobilitas barang dan orang 3. Persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik 4. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase Persentase Persentase	50,00 60,32 65,74
<b>MISI 3 : Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat</b>				
3	Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian,kehutanan, dan perikanan	Persentase	4,44
3.1	Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian,Perkebunan,Perdagangan,Industri dan pariwisata terhadap perekonomian daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	2,276
3.2	Meningkatnya mutu lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,85



<b>MISI 4 : Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing</b>				
4	Mewujudkan SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,08
4.1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing, beriman dan bertaqwa	1. Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	7,38
		2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,96
4.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,40
<b>MISI 5 : Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan</b>				
5	Meningkatkan Efektifitas Program DMIJ Plus Terintegrasi	Persentase desa berstatus Maju dalam IDM terhadap total desa	Persentase	16,95
5.1	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dlm pembangunan desa	1. Partisipasi Lembaga Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persentase	54,65
		2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	66,62
<b>MISI 6 : Memantapkan kerukunan, ketertiban, dan ketentraman kehidupan sosial</b>				
6	Mewujudkan kerukunan,keamanan, ketertiban dan ketenteraman sosial	Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial	Persentase	93
6.1	Terwujudnya stabilitas trantibumlinmas yang kondusif	Angka Pelanggaran Trantibmas	Angka	720
		Angka Konflik	Angka	1
		Persentase resiko bencana pada KRB	Persentase	1,25
<b>MISI 7 : Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran</b>				
7	Meningkatkan penanggulangan tingkat kemiskinan dan Pengangguran	Persentase penduduk miskin	Persentase	7,30
7.1	Meningkatnya Pendapatan Penduduk Miskin	Rata-rata Pendapatan Penduduk Miskin	Perbulan/ Kapita	485.035
<b>MISI 8 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah</b>				
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat berbasis sektor unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,49
8.1	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi Daerah	Rp. Milyar	315

#### 2.1.4 Isu-Isu Strategis Daerah

Permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan karena urgensinya terhadap pembangunan daerah masa kini dan mendatang. Isu strategis dirumuskan melalui berbagai informasi kebijakan pembangunan yang berasal



dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal, yakni kondisi yang menciptakan kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman bagi implementasi rencana pembangunan pada periode berjalan. Permasalahan dan isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya dapat meningkatkan peluang tercapainya berbagai target pembangunan daerah sehingga memberi nilai lebih pada setiap pelaksanaan tahapan pembangunan.

Berikut berbagai permasalahan dan isu strategis yang telah dikembangkan dan dijabarkan dalam peruntukannya sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan :

1. Pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir trendnya menurun dari 4,19% pada tahun 2019 menurun menjadi 0,34% pada tahun 2020. Terus menurunnya pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir disebabkan oleh Pandemi COVID-19 yang berdampak besar terhadap perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir .
2. PDRB per kapita Indragiri Hilir meski memiliki trend meningkat namun relatif rendah dibanding PDRB tetangga dengan kinerja untuk peningkatan PDRB per kapita yang cenderung terus menurun.
3. Jumlah penduduk miskin di Indragiri Hilir adalah yang tertinggi dibanding kabupaten tetangga dengan kinerja penurunan jumlah penduduk miskin yang semakin melemah yaitu dari 7,99% tahun 2016 menjadi 5,93% pada tahun 2020.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indragiri Hilir selama periode 2016-2020 adalah yang terendah dibanding IPM kabupaten sekitarnya dan masih jauh dari capaian IPM minimal dunia (80). kinerja indikator IPM trendnya menurun dan dibawah target RPJMD.
5. Harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2016-2020 adalah terendah dibanding kabupaten tetangga, kinerja indikator harapan lama sekolah trendnya menurun dan dibawah target RPJMD.
6. Angka harapan hidup Kabupaten Indragiri Hilir adalah yang terendah dibanding capaian Kabupaten tetangga serta Provinsi Riau. Namun Selama periode 2016-2020, rata-rata pertumbuhan AHH kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 0,24% per tahun, tertinggi dibanding rata-rata pertumbuhan AHH Kabupaten tetangga serta Provinsi Riau.
7. Proporsi jalan Kabupaten dengan kondisi Baik (14,22%) dan Mantap(59,23%), masih dibawah target dan standar Nasional (80%).
8. Proporsi jembatan dengan kondisi Baik (35,96%) dan Mantap (43,36%) masih



dibawah standar Nasional.

9. Rendahnya kualitas infrastruktur yang dibangun dan kondisi lahan gambut dan rawa pasang surut mengakibatkan tingginya frekuensi pemeliharaan terhadap infrastruktur tersebut.
10. Rendahnya rumah tangga pengguna air bersih sampai tahun 2020 hanya sebesar 20,05% dari total rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hilir jauh dari sebesar 98%
11. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketertiban masyarakat masih rendah dengan kinerja 10,00% sebagai konsekuensi kurangnya tenaga Satpol PP.
12. Belum tersedianya data Daerah Rawan Bencana dimasing-masing Kecamatan secara menyeluruh di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai acuan identifikasi bencana.
13. Belum optimalnya pendataan, verifikasi dan validasi data kemiskinan keluarga penerima manfaat (KPM) melalui sistem layanan dan rujukan terpadu dan SINK-NG menuju penyediaan Basis Data Terpadu (BDT).
14. Belum optimalnya penanganan bencana alam dan bencana sosial karena kekurangan penyediaan logistik bencana dan biaya operasional.
15. Belum optimal penanganan anak bermasalah sosial.

### **2.1.5 Strategi dan Arah Pembangunan Daerah**

Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Sedangkan isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Selanjutnya, hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah merupakan dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir periode pembangunan 2018-2023 untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Perencanaan Strategis yang dituangkan dalam RPJMD harus dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan operasional, dalam RPJMD yang disusun saat ini keselarasan antara visi, misi serta sasaran dan arah kebijakan dielaborasi dalam visi, misi kepala daerah, serta strategi dan



arah kebijakannya. Program pembangunan daerah merupakan program atau agenda strategi kepala daerah pada periode RPJMD selama lima tahun untuk mencapai sasaran daerah. Dalam pelaksanaannya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah, dan dalam pengolaannya perlu adanya manajemen strategis yang akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

**Tabel 2.2**  
**Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi**  
**Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023**

<b>VISI : UNTUK KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT</b>			
<b>MISI 1 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsive, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum</b>			
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
1.	Memantapkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.	1. Penegakan Disiplin ASN
			2. Pencegahan KKN
			3. Perumusan dan penyebarluasan informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkala
			4. Pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah secara berkala
		2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik
			2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan
<b>MISI 2 : Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah</b>			
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
2.	Memantapkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	1. Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah	1. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan
			2. Peningkatan upaya peningkatan jalan
			3. Peningkatan upaya peningkatan jembatan
			4. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan darat
			5. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan perairan, sungai dan penyeberangan



<b>MISI 3 : Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat</b>			
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
3.	Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang lebih produktif dan berwawasan lingkungan	1. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, industry dan pariwisata terhadap perekonomian daerah melalui pengembangan inovasi	1. Peningkatan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, perkebunan, perikanan,
			2. Penguatan daya saing produk pertanian, perkebunan, perdagangan, perindustrian, dan perikanan
			3. Pengembangan pemasaran pariwisata, dan destinasi wisata
			4. Penguatan pengembangan inovasi daerah
<b>MISI 4 : Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing</b>			
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
4.	Mewujudkan SDM yang berdaya saing	1. Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing, beriman dan bertaqwa	1. Peningkatan pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan dasar anak berkebutuhan khusus bermutu, merata, dan terjangkau
			2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
		2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Penguatan upaya promotif dan preventif
			2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
	3. Percepatan perbaikan gizi masyarakat dan mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat		
	4. Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi		
<b>MISI 5 : Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan</b>			
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
5.	Meningkatnya efektivitas program DMIJ Plus Terintegrasi	1. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan perempuan
			2. Peningkatan kuantitas dan kualitas pemberdayaan masyarakat desa
			3. Peningkatan kuantitas dan kualitas kelembagaan ekonomi dan sosial



<b>MISI 6 : Memantapkan kerukunan, ketertiban, dan ketentraman kehidupan sosial</b>			
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
6.	Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial	1. Terwujudnya stabilitas trantibumlinmas yang kondusif	1. Peningkatan upaya pencegahan dan penindakan tindak criminal
			2. Peningkatan kebebasan sipil
			3. Peningkatan hak-hak politik
			4. Penguatan lembaga demokrasi
			5. Pemenuhan tata kelola yang baik bidang penanggulangan bencana
<b>MISI 7 : Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran</b>			
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
7.	Meningkatnya penanggulangan tingkat kemiskinan dan pengangguran	1. Meningkatnya pendapatan penduduk miskin	1. Peningkatan perlindungan dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin
			2. Peningkatan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
			3. Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat miskin
<b>MISI 8 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah</b>			
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
8.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi rakyat berbasis sektor unggulan	1. Meningkatnya investasi daerah	1. Peningkatan promosi investasi
			2. Pemberian kemudahan dan insentif investasi

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Arah kebijakan pembangunan memberikan pedoman bagaimana strategi terhubung ke sasaran dan kapan sasaran tersebut harus dicapai. Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus sasaran dari waktu ke waktu selama masa periode 2018-2023. Arah kebijakan selama 5 tahun tersebut kemudian dijabarkan kepada prioritas dan sasaran pembangunan. Prioritas dan sasaran pembangunan menjadi tahapan pembangunan selama lima tahun yang nantinya akan menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada saat penyusunan RKPD.





Tahapan dalam pencapaian Indragiri Hilir Gemilang pada periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Arah Kebijakan				
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
<b>Tema:</b> Meningkatkan Kemajuan, Martabat dan Marwah Indragiri Hilir	<b>Tema:</b> Memperkuat Kemajuan, Martabat dan Marwah Indragiri Hilir	<b>Tema:</b> Memantapkan Kemajuan, Martabat dan Marwah Indragiri Hilir	<b>Tema:</b> Lebih Memantapkan Kemajuan, Martabat dan Marwah Indragiri Hilir	<b>Tema:</b> Menjaga Kemajuan, Martabat dan Marwah Indragiri Hilir
<b>Fokus:</b> Meningkatkan DMU Plus terintegrasi pada seluruh wilayah desa dan kelurahan, dan rehabilitasi industri kelapa untuk kesejahteraan rakyat	<b>Fokus:</b> Memperkuat DMU Plus terintegrasi melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dan pengembangan industri kelapa untuk kesejahteraan masyarakat	<b>Fokus:</b> Memantapkan DMU Plus terintegrasi melalui pemantapan infrastruktur dan penguatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dan peningkatan industri kelapa untuk kesejahteraan masyarakat	<b>Fokus:</b> Lebih memantapkan DMU Plus terintegrasi melalui pemeliharaan infrastruktur, pemantapan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dan pemantapan industri kelapa untuk kesejahteraan masyarakat	<b>Fokus:</b> Menjaga DMU Plus terintegrasi melalui pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dan industri kelapa untuk kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa fokus arah kebijakan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir 5 (lima) tahun kedepan adalah meningkatkan, memperkuat, memantapkan dan menjaga prioritas pembangunan daerah pada Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus (DMIJ-Plus). Hal ini didasarkan pada diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin memperkuat peran desa dalam pembangunan, desa bukan hanya menjadi objek pembangunan tetapi sekarang menjadi subjek pembangunan. Semangat ini diterima di seluruh daerah di Indonesia pada umumnya, Kabupaten Indragiri Hilir khususnya telah menyambut semangat pembangunan desa ini dengan meluncurkan program yang bernama Desa Maju Inhil Jaya. Konsep pemberdayaan masyarakat desa yang diusung pemerintah menjadikan ruh dari program ini. Hal yang paling utama dari program ini adalah efektifitas penggunaan Alokasi Dana Desa, DBH Pajak dan retribusi serta bantuan keuangan yang menyentuh kebutuhan dasar desa. Tujuan akhir dari program ini adalah mendorong kemandirian desa sehingga pada akhirnya desa dapat mengelola potensi yang ada di desa yang kemudian dijadikan PADes untuk membiayai kebutuhan desa mereka sendiri.



## 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ditetapkan melalui Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Adapun IKU Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :



**TABEL 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
Misi 1 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum						
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Indeks hasil evaluasi RB oleh Tim Kemenpan-RB	Hasil penilaian/ evaluasi Tim Kemenpan-RB	1. Sekretariat Daerah 2. Inspektorat Daerah
		Nilai AKIP (predikat)	Nilai/ Predikat	Nilai/ prediket hasil evaluasi AKIP oleh Tim Kemenpan-RB	Hasil penilaian/ evaluasi Tim Kemenpan-RB	1. Bappeda 2. Sekretariat Daerah 3. Inspektorat Daerah
Misi 2 : Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah						
2.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Rata-rata persentase capaian pelayanan infrastruktur wilayah	Persentase	$\frac{\text{Jumlah capaian pelayanan seluruh infrastruktur kabupaten}}{\text{Jumlah seluruh pelayanan infrastruktur kabupaten}} \times 100\%$	1. Dinas PUTR 2. Dinas Perhubungan	1. Dinas PUTR 2. Dinas Perhubungan
Misi 3 : Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat						
3.	Terwujudnya pengelolaan potensi sumberdaya alam yang lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian,kehutanan, dan perikanan	Persentase	Hasil survey dan statistik pertumbuhan PDRB di berbagai sektor di Kabupaten Indragiri Hilir oleh BPS	BPS	1. Dinas PTPHP 2. Dinas Perkebunan 3. Dinas Perikanan



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
Misi 4 : Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan iman dan taqwa						
4.	Terwujudnya SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	Hasil survey dan statistik pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Indragiri Hilir oleh BPS	BPS	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. RSUD 4. Dinas Sosial
Misi 5 : Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan						
5.	Meningkatnya Efektifitas Program DMIJ Plus Terintegrasi	Persentase desa berstatus Maju dalam IDM terhadap total desa	Persentase	Persentase jumlah desa maju ditetapkan oleh Kemendes RI	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Kecamatan
Misi 6 : Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketenteraman kehidupan sosial						
6.	Terwujudnya kerukunan,keamanan, ketertiban dan ketenteraman sosial	Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial	Persentase	Jumlah gangguan stabilitas dan ketertiban sosial yang ditangani $\frac{\text{Jumlah stabilitas dan ketertiban sosial}}{\text{Jumlah stabilitas dan ketertiban sosial}} \times 100\%$	Data Statistik Sektoral Kabupaten Indragiri Hilir	1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Kesbangpol 3. BPBD 4. Damkar



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
Misi 7 :Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran						
7.	Meningkatnya penanggulangan tingkat kemiskinan dan Pengangguran	Persentase penduduk miskin	Persentase	$GKM^*_p = \sum_{k=1}^{\Omega} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{\Omega} V_{jkp}$ <p>Dimana :</p> <p><math>GKM^*_{jp}</math> : Gris Kemiskinan Makanan daerah <math>j</math> (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori <math>p</math>).</p> <p><math>P_{jkp}</math> : Rata-rata harga komoditi <math>k</math> di daerah <math>j</math> dan provinsi <math>p</math>.</p> <p><math>Q_{jkp}</math> : Rata-rata kuantitas komoditi <math>k</math> yang dikonsumsi di daerah <math>j</math> di provinsi <math>p</math>.</p> <p><math>V_{jkp}</math> : Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi <math>k</math> di daerah <math>j</math> provinsi <math>p</math>.</p> <p><math>j</math> : Daerah (perkotaan atau pedesaan).</p> <p><math>p</math> : Provinsi ke-<math>p</math>.</p>	BPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disnakertrans</li> <li>2. Dinas Sosial</li> <li>3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> </ol>
Misi 8 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah						
8.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi rakyat berbasis sektor unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	$R = \frac{PDB_{rt} - PDB_{rt-1}}{PDB_{rt-1}} \times 100\%$ <p>Adapun keterangan simbol dari rumus tersebut adalah sebagai ber</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>R</math> = laju pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen</li> <li>▪ <math>PDB_{rt}</math> = Produk Domestik Bruto pada tahun tertentu (<math>rt</math>)</li> <li>▪ <math>PDB_{rt-1}</math> = Produk Domestik Bruto pada tahun sebelumnya</li> </ul>	BPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPMPTSP</li> <li>2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>4. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</li> <li>5. Setda</li> </ol>



## 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021



Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang Waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkna sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Menciptakan tolok ukur kinerja dengan dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021**

No	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021
1	2	3	4	5
1	Memantapkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B
1.1	Meningkatnya peyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	1. Nilai AKIP 2. Nilai LPPD 3. Opini BPK atas LKPD	Nilai/ Predikat Nilai Prediket	B Sangat Tinggi WTP
1.2	Meningkatnya kepuasan	1. Keterbukaan	Nilai	80



No	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021
	masyarakat terhadap pelayanan publik	informasi		
		2. Rata-rata Capaian Pelayanan Publik	Prediket	B
2	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah	Persentase peningkatan mobilitas barang dan orang	Persentase	50,00
2.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas	1. Rata-rata persentase capaian pelayanan infrastruktur wilayah	Persentase	68,69
		2. Persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	60,32
		3. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	65,74
3	Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian,kehutanan, dan perikanan	Persentase	4,44
3.1	Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian,Perkebunan,Perdagangan,Industri dan pariwisata terhadap perekonomian daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	2,276
3.2	Meningkatnya mutu lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,85
4	Mewujudkan SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,08
4.1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing, beriman dan bertaqwa	1. Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	7,38
		2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,96
4.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,40
5	Meningkatkan Efektifitas Program DMIJ Plus Terintegrasi	Persentase desa berstatus Maju dalam IDM terhadap total desa	Persentase	16,95
5.1	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dlm pembangunan desa	1. Partisipasi Lembaga Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persentase	54,65
		2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	66,62



No	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021
6	Mewujudkan kerukunan,keamanan, ketertiban dan ketenteraman sosial	Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial	Persentase	93
6.1	Terwujudnya stabilitas trantibumlinmas yang kondusif	Angka Pelanggaran Trantibmas	Angka	720
		Angka Konflik	Angka	1
		Persentase resiko bencana pada KRB	Persentase	1,25
7	Meningkatkan penanggulangan tingkat kemiskinan dan Pengangguran	Persentase penduduk miskin	Persentase	7,30
7.1	Meningkatnya Pendapatan Penduduk Miskin	Rata-rata Pendapatan Penduduk Miskin	Perbulan/ Kapita	485.035
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat berbasis sektor unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,49
8.1	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi Daerah	Rp. Milyar	315



LKJIP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2021

## ***BAB III***

# AKUNTABILITAS KINERJA



*CONSIST OF:*

- 3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
- 3.2 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
- 3.3 Akuntabilitas Anggaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir



**Akuntabilitas kinerja** adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang terkait berhasil atau tidaknya pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Akuntabilitas kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Indragiri Hilir tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Dari perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

### 3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selaku pengemban amanah masyarakat Indragiri Hilir melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Perwujudan dari pelaksanaan amanah akuntabilitas tersebut melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) antara Bupati Indragiri Hilir dengan Menteri PANRB tahun 2021. Dasar Perjanjian Kinerja tersebut mengacu pada hasil analisis antara target dalam dokumen RPJMD 2018-2023 dan Peraturan Bupati No 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Untuk memudahkan digunakan media formulir Pengukuran Kinerja, atas hasil pengukuran



kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis

Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Perhitungan persentase pencapaian target kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut :

1. *Semakin tinggi realisasi* menunjukkan pencapaian *kinerja semakin baik*, dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. *Semakin tinggi realisasi* menunjukkan *semakin rendah pencapaian kinerja*, digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Sasaran**  
**Dan Indikator Kinerja Sasaran**

No	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	Lebih dari 100	
2	Baik	75,00 – 99,99	
3	Cukup	65,00 – 74,99	
4	Kurang	50,00 – 64,99	
5	Sangat Kurang	0 – 49,99	



Dalam melakukan pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui system pengumpulan data kinerja dari beberapa sumber, yaitu :

- 1) Data Internal yang berasal dari sistem informasi dan pelaporan yang ada, baik laporan Kegiatan Regular, Laporan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah, Laporan Keuangan Perangkat Daerah / Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, laporan kegiatan lainnya maupun data pendukung lainnya;
- 2) Data Eksternal, digunakan data-data sekunder sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir khususnya data-data yang bersumber atas hasil hitung Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hilir.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Target Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, terdapat :

- ❖ **Misi 1 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Makin Responsif, Partisipatif, Inovatif, Efektif Dan Berketaatan Hukum.** terdiri atas: 1 tujuan, 2 sasaran, dan 6 indikator kinerja.
- ❖ **Misi 2 : Memantapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Wilayah.** Terdiri atas : 1 tujuan, 1 sasaran, dan 4 indikator kinerja.
- ❖ **Misi 3 : Melanjutkan Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Lingkungan Secara Berkelanjutan Sesuai Potensi dan Kondisi Setempat.** terdiri atas : 1 tujuan, 2 sasaran, dan 2 indikator kinerja.
- ❖ **Misi 4 : Memantapkan pembangunan SDM yang Semakin Berkualitas dan Berdaya Saing Serta Meningkatkan Iman dan Taqwa.** terdiri atas : 1 tujuan, 2 sasaran, dan 4 indikator kinerja.
- ❖ **Misi 5 : Meningkatkan Partisipasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan.** terdiri atas: : 1 tujuan, 1 sasaran, dan 3 indikator kinerja.
- ❖ **Misi 6: Memantapkan Kerukunan, Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Kehidupan Sosial.** terdiri atas : 1 tujuan, 1 sasaran, dan 4 indikator kinerja.
- ❖ **Misi 7: Melanjutkan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran.** terdiri atas : 1 tujuan, 1 sasaran, dan 2 indikator kinerja.
- ❖ **Misi 8 :Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Daerah.** terdiri atas : 1 tujuan, 1 sasaran, dan 2 indikator kinerja.



Berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan dilakukannya pengukuran kinerja pada tahun 2021, maka adapun hasil capaian indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Indikator Kinerja**  
**Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021**

No	Prediket	Rata-rata % Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat Baik	>100	8
2	Baik	75,00 - 99,99	11
3	Cukup	65,00 - 74,99	2
4	Kurang	50,00 - 64,99	0
5	Sangat Kurang	0 - 49,99	1
	N/A		6
<b>JUMLAH</b>			<b>28</b>

*Sumber data : Bagian Organisasi (diolah)*

Dari tabel diatas dapat diuraikan :

- Prediket sangat baik dengan nilai rata-rata capaian diatas 100% sebanyak 8 indikator atau **28,57%**.
- Prediket baik dengan nilai rata-rata capaian berkisar 75,00 - 99,99% sebanyak 11 indikator atau **39,29%**.
- Prediket cukup dengan nilai rata-rata capaian berkisar 65,00 - 74,99% sebanyak 2 indikator atau **7,14%**
- Prediket kurang dengan nilai rata-rata capaian berkisar 50,00 - 64,99 % sebanyak 0 indikator atau **0%**
- Prediket sangat kurang dengan nilai rata-rata capaian berkisar 0-49,99 % sebanyak 1 indikator atau **3,57%**
- Prediket N/A atau nilai rata-rata capaian belum diperoleh sebanyak 6 indikator atau **21,43%**



Adapun rincian capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memantapkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	N/A	N/A	N/A
1.1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	1. Nilai AKIP	Nilai/ Predikat	B	N/A	N/A	N/A
2. Nilai LPPD		Nilai	Sangat Tinggi	NA	N/A	N/A	
3. Opini BPK atas LKPD		Prediket	WTP	NA	N/A	N/A	
1.2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Keterbukaan informasi	Nilai	80	97	121,25%	Sangat Baik
2	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah	Persentase peningkatan mobilitas barang dan orang	Persentase	50	40,24	80,48	Baik
2.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas	1. Rata-rata persentase capaian pelayanan infrastruktur wilayah	Persentase	68,69	57,00	82,98	Baik



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	65,74	54,13	82,33	Baik
		3. Persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	60,32	43,92	72,81	Cukup
3	Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian,kehutanan, dan perikanan	Persentase	4,44	4,01	90,31	Baik
3.1	Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian,Perkebunan,Perdagangan,Indus tri dan pariwisata terhadap perekonomian daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	2,276	2.411 (BRIN)	106%	Sangat Baik
3.2	Meningkatnya mutu lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,85	64,79	104,75%	Sangat Baik
4	Mewujudkan SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,08	66. 63	97,87	Baik
4.1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing, beriman dan bertaqwa	1. Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	7,38	7.24	98,10%	Baik
		2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,96	11.93	92,05%	Baik
		3. Angka Harapan Hidup	Tahun	68,40	67,98	99,39%	Baik



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Meningkatkan Efektifitas Program DMIJ Plus Terintegrasi	Persentase desa berstatus Maju dalam IDM terhadap total desa	Persentase	16,95	16.24	95,81%	Baik
5.1	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dlm pembangunan desa	1. Partisipasi Lembaga Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persentase	54,65	55,00	100,64%	Sangat baik
		2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	66,62	NA	N/A	N/A
6	Mewujudkan kerukunan,keamanan, ketertiban dan ketenteraman sosial	Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial	Persentase	93	93	100%	Sangat baik
6.1	Terwujudnya stabilitas trantibumlinmas yang kondusif	Angka Pelanggaran Trantibmas	Angka	720	1208	70,04%	Cukup
		Angka Konflik	Angka	1	1	100%	Sangat baik
		Persentase resiko bencana pada KRB	Persentase	1,25	3,1	40,32%	Sangat Kurang
7	Meningkatkan penanggulangan tingkat kemiskinan dan Pengangguran	Persentase penduduk miskin	Persentase	7,30	6,18	84,66	Baik
7.1	Meningkatnya Pendapatan Penduduk Miskin	Rata-rata Pendapatan Penduduk Miskin	Perbulan/ Kapita	485.035	518,283	106,85	Sangat Baik





No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat berbasis sektor unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,49	4,44	89,97	Baik
8.1	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi Daerah	Rp. Milyar	315	1.711	543%	Sangat Baik

Sumber data : Bagian Organisasi (diolah)



## 3.2 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan fase ketiga pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023. Penyusunan rencana pembangunan tahun 2020 disusun dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan baik Pemerintah Provinsi Riau maupun Kabupaten Indragiri Hilir dengan memperhatikan kebijakan nasional khususnya untuk rencana pembangunan tahun 2021. Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja yang telah dicapai diatas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator kinerja. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tujuan ke-1

### 1) Memantapkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Sejalan dengan prinsip-prinsip birokrasi modern, reformasi birokrasi adalah upaya untuk merubah praktek-praktek birokrasi yang tidak efektif menuju ke arah praktek-praktek administrasi pemerintahan yang baik. Reformasi Birokrasi sangat diperlukan untuk menciptakan *clean* dan *governance*. Reformasi Birokrasi pada dasarnya ditujukan pada tiga aspek, yaitu struktur organisasi, sistem yang mengatur dan orang-orang yang melaksanakannya.

Tujuan Ke-1 pada capaian kinerja Kabupaten Indragiri Hilir adalah Memantapkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan 2 sasaran strategis, yaitu: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel, dan Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik. Tujuan ke-1, diukur dengan 6 (enam) indikator yaitu Indeks RB, Nilai AKIP, Nilai LPPD, Opini BPK Atas LKPD, Nilai Keterbukaan Informasi, dan Rata-rata Predikat Pelayanan Publik.

**Tabel 3.4**  
**Capaian Kinerja Memantapkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian (%)	Tahun 2021		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks RB	Prediket	B	B	100%	B	N/A	N/A
2	Nilai AKIP	Prediket	B	B	100%	B	N/A	N/A
3	Nilai LPPD	Nilai	Tinggi	N/A	N/A	Sangat Tinggi	N/A	N/A
4	Opini BPK Atas LKPD	Prediket	WTP	WTP	100%	WTP	N/A	N/A
5	Nilai Keterbukaan Informasi	Nilai	79	95	120,25%	80	97	121,25%



6	Rata-rata Predikat Pelayanan Publik	Prediket	B	N/A	N/A	B	NA	N/A
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>105,06%</b>			<b>121,25%</b>

Sumber data : Bagian Organisasi (diolah)

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, Rata-rata Capaian Kinerja pada Tahun 2020 adalah 105,06% dan Rata-rata Capaian Kinerja pada tahun 2021 sebesar 121,25%. Hal ini tidak berarti pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 16,19% karena hanya 1 indikator yang tercapai. Tujuan Memantapkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdapat 4 indikator kinerja belum dapat dihitung capaiannya pada tahun 2021 dikarenakan belum keluarnya hasil penilaian dari Kemenpan RB-RI untuk Indikator Kinerja Indeks RB, Nilai AKIP, dan Rata-rata predikat pelayanan publik serta Kemendagri RI untuk Indikator Kinerja Nilai LPPD. Untuk rincian analisis capaian setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut ini :

### Indeks Reformasi Birokrasi

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh dan bertahap 5 (lima) tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bertujuan untuk mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi serta mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sekaligus berperan aktif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan transparan serta akuntabel. Sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang kapabel
3. Pelayanan Publik yang prima

Perkembangan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada 8 (delapan) Area Perubahan : Reformasi Birokrasi di pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 adalah 60,38 dengan kategori "B". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Komponen Penilaian**

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	9,75
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,28
	III. Reform	30,00	15,06



Total Komponen Pengungkit		60,00	30,10
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	6,86
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,55
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,55
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,32
Total Komponen Hasil		40,00	30,28
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	60,38

No	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Merit System	0-100	262,5 (Baik)	Komisi Aparatur Sipil Negara
2.	Profesionalitas ASN	0-100	52,40 (Sangat Rendah)	Badan Kepegawaian Negara
3.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	0 (Kurang)	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4.	Kualitas Pengelolaan	0-100	50,74 (Cukup)	Arsip Nasional Republik Indonesia
5.	Maturitas SPIP	0-5	3 (Terdefinisi)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6.	Kapabilitas APIP	0-5	3 (Integrated)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7.	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Penyelenggara Pelayanan	0-100	83,15 (Zona Hijau)	Ombudsman Republik Indonesia

Mengacu pada PerMenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, *tools* evaluasi RB oleh Kementerian PANRB pada tahun 2020 berbeda dengan tahun 2019 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan indeks RB per area perubahan. Secara menyeluruh terdapat kenaikan indeks RB dari 60,12 di tahun 2019, menjadi 60,38 di tahun 2020 (peningkatan sebanyak 0,26 poin).

Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi berbagai rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan pada hasil evaluasi tahun sebelumnya dan belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga belum terdapat perbaikan yang signifikan dalam penerapan Reformasi Birokrasi.



Terkait komponen hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang didapatkan sebagai berikut berikut :

- a. Terkait dengan akuntabilitas kinerja dan keuangan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan akuntabilitas kinerja dengan nilai SAKIP 62,79 dengan kategori B (BAIK)) tahun 2020 dan akuntabilitas keuangan dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun 2019.
- b. Survei eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan hasil :

**Tabel 3.6**  
**Hasil Survei**

No.	Hasil Survei	Indeks		Rata-rata Nasional
		2019	2020	2020
1.	Survei Eksternal Kualitas Pelayanan	3,29	3,02	3,37
2.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	3,33	3,42	3,50

- 1) Hasil survei persepsi pelayanan tahun 2020 menunjukkan indeks 3,02 dari skala 4. Angka ini cukup rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Selain itu, hasil survei persepsi pelayanan juga mengalami penurunan dari angka tahun lalu yaitu sebesar 3,29. Penurunan hasil survei ini mengindikasikan adanya penurunan persepsi stakehoders terhadap kepuasan pelayanan yang diberikan;
- 2) Hasil survei persepsi korupsi tahun 2020 yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan yang menunjukkan indeks 3,42 dari skala 4, di bawah angka rata-rata nasional. Apabila dibandingkan dengan hasil survei pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,33 maka terdapat peningkatan persepsi *stakeholders* terhadap pembangunan anti korupsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap integritas aparatur pemberi layanan sudah mengalami perbaikan.
- 3) Hasil survei internal organisasi terhadap responden Pegawai Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan indeks 3,04 (skala 5), dengan rincian sebagai berikut: Hanya 10 % respon dan memahami secara keseluruhan mengenai kinerja, indikator kinerja, dan kontribusinya terhadap organisasi; kemudian 67,5% responden memahami kinerja dan indikator kinerja atau kontribusinya terhadap organisasi; sebanyak 17,5% responden, hanya memahami kinerja individunya saja, sedangkan sisanya terdapat 5% responden sama sekali tidak memahami kinerja individu, tidak



memahami indikator kinerja individu, dan tidak memahami kontribusi kinerjanya terhadap kinerja organisasi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola Birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja melayani lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu ;

1. Mengoptimalkan fungsi tim Reformasi Birokrasi internal, assessor, dan tim penilai internal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi terutama pada OPD, serta memastikan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dapat ditindak lanjuti secara maksimal dan tercipta perbaikan berkelanjutan dalam proses implementasi Reformasi Birokrasi;
2. Memastikan bahwa seluruh kebijakan yang ada memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya dan kebijakan terkait pelayanan sudah memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan yang diberikan sehingga dapat berkontribusi dalam memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat;
3. Menindaklanjuti surat edaran menteri PANRB Nomor 382 s.d 393 tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional. Hal tersebut merupakan hal dari upaya mewujudkan Birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional;
4. Menyusun peta proses bisnis secara menyeluruh dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis berkala untuk memastikan pencapaian kinerja berjalan secara optimal serta melakukan optimalisasi penerapan **e-government** dengan menyusun perencanaan pengembangan SPBE dengan baik dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
5. Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan menindaklanjuti pemanfaatan hasil assessment sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau HCDP secara menyeluruh dan melaksanakan pemetaan talenta pegawai dengan baik;
6. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara menyeluruh serta mengidentifikasi peluang perbaikan lain untuk memastikan terjadinya akuntabilitas kinerja;
7. Mengoptimalkan implementasi kebijakan pegawai internal, terutama dalam hal penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan memastikan seluruh fungsi APIP dapat berjalan dengan baik;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya dengan menindak lanjuti hasil penilaian survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh dan



mendorong lahirnya inovasi-inovasi dalam hal pelayanan agar mampu memberikan kepuasan secara maksimal kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya telah mengalami banyak perubahan, yang pada hakekatnya perubahan itu semata-mata untuk kepentingan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perubahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melibatkan partisipasi masyarakat, hal ini sebagai bentuk keterbukaan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengapresiasi aspirasi masyarakat, sehingga kebutuhan dan harapan masyarakat secara bertahap dapat terpenuhi. Selain itu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan perubahan Reformasi Birokrasi fokus untuk 5 (lima) tahun kedepan guna mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada 8 (delapan) area perubahan:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
3. Penataan Organisasi/Kelembagaan;
4. Penataan Tata Laksana;
5. Penataan Manajemen SDM;
6. Penguatan Akuntabilitas;
7. Pengawasan;
8. Pelayanan Publik

#### **Area Manajemen Perubahan**

##### **A. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Indragiri Hilir :**

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts.346/IV/HK-2021 tentang Pembentukan Tim Pengarah, Pelaksana dan Sekretariat Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021.





B. Sosialisasi Peraturan Bupati No 72 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024.

Pada Area Manajemen Perubahan Rekomendasi dari Surat KemempnRB tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 dengan Nomor : B/180/RB.06/2021 Mengoptimalkan fungsi tim Reformasi Birokrasi internal, assesor, dan tim penilai internal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi terutama pada Perangkat Daerah. Serta memastikan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara maksimal dan tercipta perbaikan berkelanjutan dalam proses implementasi reformasi birokrasi.

1. Tim Reformasi Birokrasi Internal melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 72 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 - 2024 pada tanggal 08 April 2021.
2. Tim Penilai Internal melakukan penambahan sampel Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi Reformasi Birokrasi, yang semula 10 Perangkat Daerah menjadi 25 Perangkat Daerah. untuk lebih meningkatkan Reformasi Birokrasi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tim Penilai Internal melakukan Pendampingan/asistensi kepada perangkat daerah dimana pada tahun sebelumnya Perangkat Daerah yang menjadi Sampel 10 tahun 2021 meningkat menjadi 25 Perangkat daerah yang di asistensi oleh Tim penilai Internal Kabupaten. Kegiatan ini akan terus berlanjut di masa mendatang ke seluruh perangkat daerah yang melaksanakan Reformasi Birokrasi.
3. Menetapkan Road Map melalui Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 72 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 - 2024 sebagai pengganti Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2019.
4. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten telah menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024. Tim yang di tugaskan melalui SK Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 486/VI/HK-2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 mempunyai tugas Menetapkan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 303/IV/HK-2021 tanggal 07 April 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Peran Agen





Perubahan Reformasi nantinya agen perubahan, ASN harus dapat mengubah sistem dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik, yaitu hadir di tengah masyarakat, menghadirkan inovasi.

### Area Perubahan : Deregulasi Kebijakan

*Progress* reform yang telah dilakukan Bagian Hukum SETDA telah melakukan pendampingan dan asistensi atas aspek *legal drafting* maupun *legal opinion* kepada Perangkat Daerah yang melakukan penyusunan dan perbaikan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan telah melakukan Harmonisasi Terhadap Produk Hukum.



### Area Perubahan : Penataan dan Penguatan Organisasi



Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan professional. Sebanyak 344 Pejabat Eselon IV di Inhil dilantik menjadi Penjabat

Fungsional. Pelantikan ini Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan - RB) RI Nomor 17 TH 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dan Surat Keputusan Bupati No.KPTS.1086/XII/HK-2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Optimalisasi Penerapan e Government sudah dilakukan melalui Media Aplikasi Inpas yang dan Media Elektronik GTV yang dibuat oleh Kominfo sebagai Informasi bagi Masyarakat. Dalam penerapan *e-government* Pemerintah Kabupaten Inhil telah membuat Perda SPBE





dimana Perda tersebut memuat untuk mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan pemerintahandaerah; efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik

#### **Area Perubahan : Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur**



Pemerintah Kabupaten Inhil Telah Memiliki Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir yang Telah di keluarkanya keputusan Bupati Nomor: KPTS. 405/V/HK-2020, sebagai pedoman sistem merit dalam Manajemen ASN dan sistem Merit ini telah mendapatkan Anugrah Meritokrasi Penghargaan Penerapan Sistem Merit bagi Instansi Pemerintah dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan Nilai 262,5 di katagorikan (Baik) dan pada tahun 2021meningkat menjadi 281, 5 masih dalam kategori Baik.

#### **Area Penguatan Pengawasan**

Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan harmonisasi Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara dan Gratifikasi dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

#### **Area Pelayanan Publik**

Pemerintah kabupaten Inhil sudah melaksanakan Audiensi dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk pendampingan/konsultasi Pembentukan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Inhil. Dalam rangka mempercepat Pembentukan Mall Pelayanan Publik (MPP).



## Nilai AKIP

Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2021 belum dapat dituangkan pada laporan ini dikarenakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum memberikan nilai hasil evaluasi AKIP kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Terkait dengan kondisi tersebut rujukan Nilai AKIP menggunakan hasil evaluasi AKIP tahun 2019 dan tahun 2020.

Adapun gambaran hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Hasil Penilaian Kemenpan RB**

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
			2019	2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	17,98	22,43
b.	Pengukuran kinerja	25	15,08	16,72
c.	Pelaporan Kinerja	15	8,99	9,11
d.	Evaluasi Internal	10	5,63	6,06
e.	Capaian Kinerja	20	7,44	8,47
Nilai Hasil Evaluasi		100	55,12	62,79
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	B

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memperoleh nilai 62,79 atau predikat B. Hasil nilai evaluasi AKIP pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah meningkatkan budaya kinerja yang lebih efektif dan telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran guna mengoptimalkan belanja program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menindaklanjuti Rekomendasi hasil evaluasi tahun 2019 sehingga telah terjadi peningkatan peningkatan akuntabilitas kinerja. Walaupun dengan adanya peningkatan hasil evaluasi AKIP pada tahun 2020 tersebut namun masih perlu disempurnakan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan suatu masukan terkait perbaikan lebih lanjut atas capaian evaluasi kinerja tersebut.



Adapun hasil penilaian kinerja AKIP tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2019**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menyempurnakan dokumen-dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil/outcome.	Telah dilakukan Review dan penyempurnaan Dokumen Perencanaan strategis Pemda (RPJMD,IKU) berdasarkan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah Melalui <i>Penyempurnaan Pohon Kinerja</i> .
2	Memperbaiki indicator-indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja sehingga ukuran keberhasilan menjadi lebih andal.	Telah dilakukan <i>refocusing tujuan, sasaran serta indikator kinerja Tujuan dan sasaran (PEMDA)</i> yang berorientasi hasil disertai indikator kinerja yang tepat sebagai alat ukur keberhasilan kinerja .
3	Memperbaiki penjabaran perencanaan kinerja (cascade down) dari level pemerintah daerah kepada PD hingga level individu.	Telah dilakukan penyempurnaan <i>penjabaran perencanaan kinerja (cascade down)</i> dari level pemerintah daerah kepada PD hingga level individu melalui penyempurnaan <i>Pohon Kinerja Perangkat Daerah</i> yang di breakdown ke <i>Cascading Perangkat Daerah</i> .
4	Menyusun rencana aksi setiap PD sebagai rincian kegiatan atas perjanjian kinerja PD dengan target kinerja secara periodik/triwulan yang kemudian dimonitoring dan dievaluasi secara berkala.	Telah disusun <i>rencana aksi setiap Perangkat Daerah</i> sebagai rincian kegiatan atas perjanjian kinerja PD dengan target kinerja secara periodik/triwulan yang kemudian dimonitoring dan dievaluasi secara berkala.
5	Menyajikan informasi analisis faktor keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan, serta analisis efisiensi penggunaan sumberdaya yang terkait dalam pencapaian sasaran kinerja untuk mendapatkan umpan balik dari para pengambil keputusan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di periode yang akan datang	Dalam <i>Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020</i> akan disempurnakan sajian informasi analisis faktor keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan , serta analisis efisiensi penggunaan sumberdaya yang terkait dalam pencapaian sasaran kinerja untuk mendapatkan umpan balik dari para pengambil keputusan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di periode yang akan datang
6	Melakukan evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja PD serta meningkatkan kualitas evaluasi dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan AKIP yang berkelanjutan terhadap masing-masing PD.	Telah dilaksanakan kegiatan <i>FGD Implementasi SAKIP</i> dengan pelaksanaan <i>Evaluasi mandiri serta dilanjutkan dengan Monitoring hasil Penyempurnaan atas hasil rekomendasi Perbaikan dokumen SAKIP Perangkat Daerah</i>



Bagian Organisasi Setda inhil Melaksanakan Kegiatan Workshop Percepatan Peningkatan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021. Agenda Kegiatan ini Berisi Pemaparan dari berbagai Narasumber terkait SAKIP dan RB



Kabupaten Indragiri Hilir. Informasi Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Internal disampaikan oleh Inspektorat Daerah, dan Informasi Dokumen SAKIP disampaikan oleh Tim dari Bappeda Kab.Inhil. sementara itu Kabag Organisasi Setda Inhil Qudri Ramaputera SH,MH memberikan Presentase tentang Pelaporan Kinerja Kabupaten dan Perangkat Daerah yang dinilai masih perlu perbaikan dalam penyusunan Laporan Kinerja pada perangkat daerah dalam Menjawab Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang disesuaikan dengan PERMENPAN No 53 Tahun 2014.

Bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tim SAKIP 2022 dari Pokja Perencanaan Melaksanakan Forum Group Discussion tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan Permenpan No 53 Tahun 2014 pada Hari Rabu 29 Desember 2021. Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi pemerintah yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dan merupakan bagian dari Penyelenggaran SAKIP yang tertuang dalam Perpres No 29 Tahun 2014.





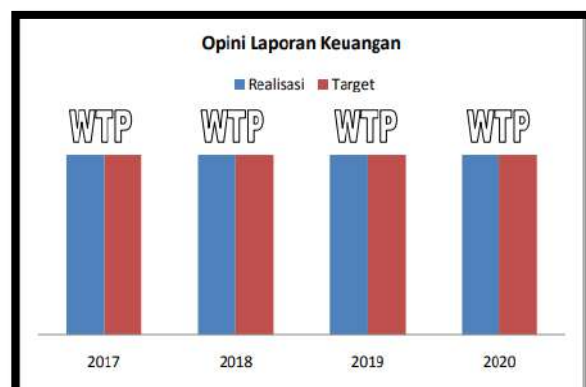
## Nilai LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu Kemendagri telah menetapkan indikator kinerja kunci untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi pencapaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut karena kinerja yang terbaik setiap pemerintah daerah bukan ditetapkan berdasarkan standar, tetapi melalui proses perbandingan antara pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD adalah Laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan RKPD yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah dan LPPD yang dilaporkan harus menggambarkan kondisi nyata kinerja daerah. Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir setiap tahun selalu mengalami peningkatan meskipun masih dalam status yang sama yaitu “Tinggi”. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan status penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu pemantauan untuk capaian kinerja urusan pemerintahan, peningkatan kualitas penyusunan LPPD serta koordinasi dengan perangkat daerah. Untuk tahun 2020, strategi yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah :

1. Melakukan koordinasi yang intensif antara Tim penyusunan LPPD Kabupaten dengan Tim LPPD perangkat daerah.
2. Melakukan pembinaan kepada perangkat daerah;
3. Percepatan pencapaian Indikator-indikator Kinerja Kunci yang menjadi evaluasi Kemendagri.

## Opini Laporan Keuangan (OLK)

Target IKU Opini Laporan Keuangan adalah kategori “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Sampai akhir tahun 2020, Indragiri Hilir berhasil mencapai kategori “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dengan capaian kinerja sebesar 100% atau “TERCAPAI”. Interpretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja di Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa tata kelola akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dinilai oleh BPK telah akuntabel, wajar, dan transparan hal ini menjadi dasar BPK memberikan opini dengan kategori WTP.





Selama Periode 2017-2020, Kabupaten Indragiri Hilir berhasil mempertahankan Opini WTP hasil pemeriksaan BPK secara berturut-turut. Capaian hasil akuntabilitas tidak terlepas dari upaya :

1. Melakukan penyesuaian berbagai regulasi pengelolaan keuangan
2. Upaya peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah
3. Adanya aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting* dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah
4. Meningkatnya peran APIP dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah.

Namun pada tahun 2021, belum diperoleh Nilai Opini Laporan Keuangan dan baru rilis di tahun 2022.

### Nilai Keterbukaan Informasi

Modernisasi teknologi informasi memberikan keluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat sehingga pemerintah dituntut untuk membuka diri dalam memberikan informasi dan kebijakan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah berupaya untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat sehingga informasi yang diperlukan mudah di akses dari mana saja, sesuai dengan tuntutan kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas,transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.



Keseriusan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan Keterbukaan Informasi tergambar dalam hasil monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi serta pemeringkatan yang dilakukan Komisi Informasi Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor 01/KEP/KIP-R/XI/2021 tentang Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Provinsi Riau terhadap 90 Badan Publik yang ada di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir berada di tempat teratas, meraih nilai tertinggi se-Provinsi Riau dengan kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Informatif.



Adapun nilai yang diperoleh Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 97, dengan target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 80, hal ini menjelaskan bahwa capaian Nilai Keterbukaan Informasi melebihi target 100 persen atau capaian sebesar 121,25%.

Adapun penyebab keberhasilan tinggi nya nilai keterbukaan informasi, adalah adanya Tata kelola yang terintegrasi antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi utama yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

**Tabel 3.9**  
**Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Se- Provinsi Riau Perkategori Tahun 2021**

No	PPID UTAMA BADAN PUBLIK KAB/KOTA	NILAI	KUALIFIKASI
1	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	97	INFORMATIF

Sumber : Komisi Informasi Provinsi Riau

Lampiran : Keputusan Komisi Informasi Provinsi Riau  
Nomor : 01/KEP/KIP-R/XI/2021  
Tanggal : 24 November 2021

**KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**

NO	PPID UTAMA BADAN PUBLIK KAB/KOTA	NILAI	KUALIFIKASI
1	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	97	INFORMATIF
2	KABUPATEN BENGKALIS	96	INFORMATIF
3	KABUPATEN KAMPAR	95	INFORMATIF
4	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	91	MENUJU INFORMATIF
5	KABUPATEN SIAK	87	MENUJU INFORMATIF
6	KOTA PEKANBARU	85	MENUJU INFORMATIF
7	KABUPATEN ROKAN HULU	85	MENUJU INFORMATIF
8	KOTA DUMAI	78	CUKUP INFORMATIF
9	KABUPATEN ROKAN HILIR	74	CUKUP INFORMATIF
10	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	72	CUKUP INFORMATIF
11	KABUPATEN PELALAWAN	71	CUKUP INFORMATIF
12	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	69	CUKUP INFORMATIF

Lampiran : Keputusan Komisi Informasi Provinsi Riau  
Nomor : 01/KEP/KIP-R/XI/2021  
Tanggal : 24 November 2021

**KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**

NO	PPID UTAMA BADAN PUBLIK KAB/KOTA	NILAI	KUALIFIKASI
1	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	97	INFORMATIF
2	KABUPATEN BENGKALIS	96	INFORMATIF
3	KABUPATEN KAMPAR	95	INFORMATIF
4	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	91	MENUJU INFORMATIF
5	KABUPATEN SIAK	87	MENUJU INFORMATIF
6	KOTA PEKANBARU	85	MENUJU INFORMATIF
7	KABUPATEN ROKAN HULU	85	MENUJU INFORMATIF
8	KOTA DUMAI	78	CUKUP INFORMATIF
9	KABUPATEN ROKAN HILIR	74	CUKUP INFORMATIF
10	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	72	CUKUP INFORMATIF
11	KABUPATEN PELALAWAN	71	CUKUP INFORMATIF
12	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	69	CUKUP INFORMATIF

Selain itu juga Beberapa upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan Nilai Keterbukaan Informasi tersebut adalah dengan terus melakukan inovasi yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi guna memberikan transparansi penyelenggaraan pemerintah dalam rangka keterbukaan informasi publik, antara lain dengan membentuk :

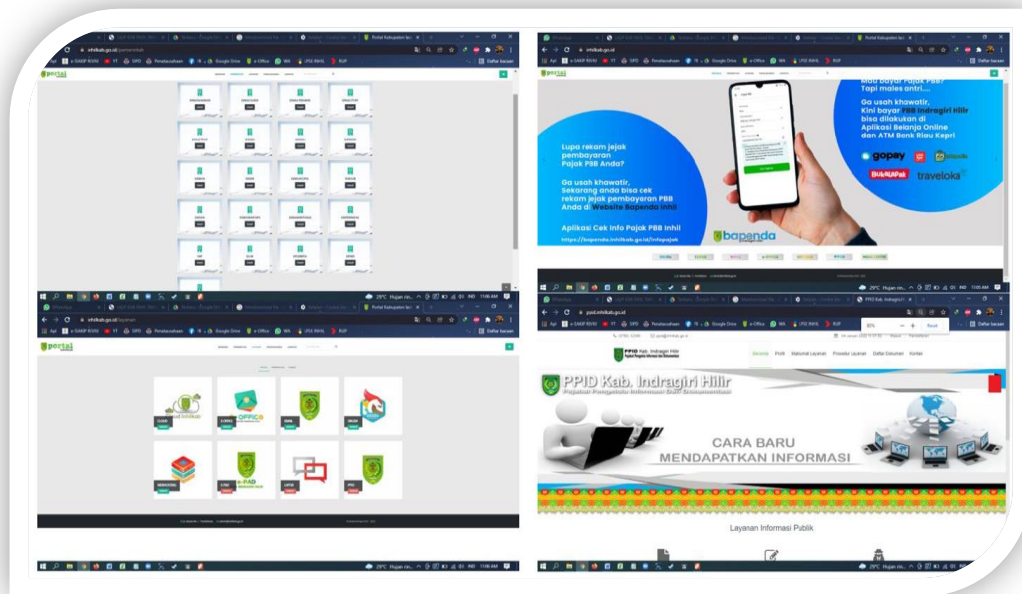
1. Kabupaten Indragiri Hilir Menuju Smart City
2. Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik
3. Pembangunan Indragiri Hilir yang berbasis Inhil Satu Data
4. Pelaksanaan dan Penerapan Sistem e-Government
5. Keterbukaan dan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat
6. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat akan Teknologi Komunikasi dan Informasi Berbasis Kearifan Lokal.





Hal tersebut diatas juga didukung dengan Beberapa Program dan Kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberikan transparansi penyelenggaraan pemerintah dalam rangka keterbukaan informasi publik yaitu:

1. Membangun Web Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (inhilkab.go.id)
2. Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
3. Mendirikan media center yang merupakan pusat informasi bagi masyarakat.
4. Pengembangan system *e-government* pada perangkat daerah.
5. Penyediaan sarana prasarana informasi publik.



### Rata-rata Predikat Pelayanan Publik

Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik, negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik. Untuk itu berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik baik itu instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanannya.

**Tabel 3.10**  
**Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik**  
**Tahun 2019-2021 Kabupaten Indragiri Hilir**

UPP	2019		2020		2021	
	IPP	KATEGORI	IPP	KATEGORI	IPP*	KATEGORI
DPM-PTSP	3,61	B (Baik)	3,63	B (Baik)	N/A	N/A
DISDUKCAPIL	2,82	C (Cukup)	2,84	C (Cukup)	N/A	N/A
RSUD PURI HUSADA	3.29	B- (Baik Dengan Catatan)	(Hanya 2 UPP, dan RSUD Tidak dilakukan survey di tahun 2020 dan 2021)			
RATA-RATA/ KATEGORI	3,22	B-	3.24	B-	N/A	N/A

Sumber data : Hasil Evaluasi Penyelenggara Pelayanan Publik Kemenpan-RB



Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dari hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kemenpan RB pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019 Survey dilakukan pada 3 (tiga) perangkat daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan nilai 3,61 kategori B (Baik) , Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan nilai 2,82 kategori C (Cukup) dan RSUD Puri Husada Tembilaan dengan nilai 3,22 kategori "B-" dengan nilai rata-rata untuk kabupaten Indragiri Hilir 3,22 kategor B- . Sedangkan untuk hasil evaluasi pada tahun 2020 dilakukan pada 2 (dua) perangkat daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan nilai 3,61 kategori B (Baik) , Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan nilai 2,82 kategori C (Cukup) mendapat nilai rata-rata untuk Kabupaten Indragiri Hilir 3, 24 dengan kategori B-.

Hal ini merupakan tahun kedua Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memperoleh IPP dengan Katgori B-. dan belum memenuhi target B yang dicanangkan dalam target Indikator Kinerja Utama. Namun dalam penilaian IPP untuk tahun 2020 ada kenaikan angka sebesar 0,04 point dari tahun 2019 sebelumnya. Dan untuk target kinerja pada tahun 2021 adalah ketegori B (Baik)\* namun hasil evaluasi penyelenggaraan publik tahun 2021 belum dapat disajikan karena masih menunggu rilis dari KemenPAN-RB.

Beberapa yang menjadi kendala dalam dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain:

1. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pada Unit Pelayanan Publik sebagaimana yang dipersyaratkan dalam standar pelayanan.
2. Belum terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tiap Unit Pelayanan Publik
3. Keterbatasan Lokasi Gedung Perkantoran sehingga aspek-aspek yang menjadi standar pelayanan kurang maksimal untuk dipenuhi.

Beberapa solusi yang harus dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik dilingkungan Kabupaten indragiri Hilir untuk meningkatkan Kualitas pelayanan Publiknya antara lain :

1. Peningkatan pada sarana dan prasaran pelayanan
2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pada tiap Unit pelayanan Publik
3. Lokasi Gedung Perkantoran yang layak.

Hal lainnya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabuapten Indragiri Hilir dalam Menigkatkan Kualitas pelayanan Publik adalah dengan membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP) sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pembentukan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Indragiri Hilir telah melewati tahap perencanaan, yang selanjutkan untuk tahun 2022 akan dilakukan Pembangunan Gedung MPP yang rencana akan diresmikan pada tahun 2023.



Selain Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh KemenPAN-RB, Ombudsman Republik Indonesia turut melaksanakan Penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik dan hasil penilaian kepatuhan diharapkan menjadi acuan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk percepatan penilaian kualitas pelayanan publik dan sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Ombudsman Republik Indonesia mendorong penyelenggara pelayanan publik mematuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

**Tabel 3.11**  
**Kategorisasi Penilaian Kepatuhan Pemerintah Daerah berdasarkan Ombudsman RI :**

Nilai	Tingkat Kepatuhan	Zona
0 – 50.99	Rendah	Merah
51.00 – 80.99	Sedang	Kuning
81.00 – 100	Tinggi	Hijau

**Tabel 3.12**  
**Penilaian Kepatuhan Pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir**

NO	Penilaian		Tingkat Kepatuhan	Zona
1	2018	83.15	Tinggi	Hijau
2	2021	89.21	Tinggi	Hijau

Berdasarkan Penilaian Kepatuhan yang dilakukan oleh Ombudsman pada Tahun 2021, Kabupaten Indragiri Hilir mendapat prediket “Kepatuhan Tinggi atau Zona Hijau” dengan Nilai rata-rata 89,21. Dalam hal ini terjadi peningkatan rata-rata sebesar 6.06 point dari penilaian OMBUDSMAN RI yang dilakukan pada tahun 2018 yakni dengan nilai 83, 15.





Tujuan ke: 2

**Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas antar wilayah**

Peningkatan Konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah dapat dilakukan dengan cara pembangunan infrastruktur berkualitas. Infrastruktur berkualitas merupakan suatu istilah yang merujuk pada suatu kondisi yang memberikan gambaran berbagai jenis fasilitas yang dibuat khusus untuk mendukung segala aktivitas dan kegiatan masyarakat umum dalam kehidupan manusia yang berkondisi baik sampai sedang. Berdasarkan tujuan yang tertuang dalam Perbup perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 pada Tujuan ke- 2 yaitu memantapkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, maka kondisi berkualitas dimaksud adalah yang berkondisi baik.

Tujuan Ke-2 pada capaian kinerja Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 1 sasaran strategis, yaitu: Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Tujuan ke-2, diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu Rata-rata persentase capaian pelayanan infrastruktur wilayah, Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, Persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik, Persentase peningkatan mobilitas barang.

**Tabel 3.13**  
**Capaian Kinerja Meningkatnya Konektivitas & Aksesibilitas AntarWilayah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian (%)	Tahun 2021		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Peningkatan Mobilitas barang dan Orang	Persentase	50,00	39,36	78,72%	50	40,24	80,48%
2	Rata-rata Persentase capaian pelayanan infrastruktur wilayah	Persentase	63,37	48,44	76,44%	68,69	57,00	82,98%
3	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	61,79	61,00	98,72%	65,74	54,13	82,33%
4	Persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	58,32	44,96	77,09%	60,32	43,92	72,81%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>82,74%</b>			<b>76,95%</b>

Sumber data : Bagian Organisasi (diolah)



Berdasarkan tabel capaian kinerja Meningkatnya Konektifitas & Aksesibilitas antar wilayah dapat dijelaskan bahwa Rata-rata Capaian Kinerja pada pada Tahun 2020 sebesar 82,754 dan Tahun 2021 sebesar 76,95, artinya bahwa capaian kinerja pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 5,79%. Untuk rincian analisis capaian setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut ini :

### Persentase Peningkatan Mobilitas Barang dan Orang

Kondisi alam Kabupaten Indragiri Hilir yang sebagian besar terdiri daerah perairan dan berada di pesisir, menyebabkan masyarakat masih sangat bergantung dengan transportasi air untuk menghubungkan kecamatan, antar desa maupun antar dusun. Sarana angkutan air yang paling banyak digunakan masyarakat adalah Speed Boat, dan Perahu.

**Tabel 3.14**  
**Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Mobilitas Barang dan Orang**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian (%)	Tahun 2021		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase peningkatan mobilitas barang dan orang	Persentase	50,00	39,36	78,72%	50%	40,24%	80,48%

Sumber data : LKIP DISHUB Tahun 2021

Dalam menentukan persentase peningkatan mobilitas barang dan orang pada tahun 2021 adalah Jumlah Angkutan Barang dan Orang dibagi dengan Jumlah Angkutan Barang dan Orang yang dibutuhkan. Pada tahun 2021 target persentase peningkatan mobilitas barang dan orang sebesar 50% dengan realisasi 39,36% atau capaian sebesar 78,72%. Dan ditahun 2021 masih di target sebesar 50% dengan realisasi sebesar 40,42% atau target tercapai sebesar 80,48%. Dalam hal ini terdapat peningkatan dari tahun 2020 sebesar 1,76%.

Selain angkutan air, jalan sebagai sarana angkutan darat juga merupakan sarana transportasi yang sangat penting, baik sarana dalam kota maupun sarana yang menghubungkan antar wilayah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir maupun daerah yang berada di luar kota yang ada di Propinsi Riau maupun daerah tetangga lainnya. Untuk mendukung konektivitas antar wilayah, maka tidak hanya obyek atau tempat tertentu saja yang perlu pembenahan namun diperlukan pembenahan secara menyeluruh. Perbaikan infrastruktur Kabupaten terus menerus dilaksanakan seperti pembenahan dan perbaikan dimulai pada perbaikan drainase, normalisasi gorong-gorong, dan penimbunan jalan yang rusak melalui Perangkat Daerah yang



bertanggung jawab atas pencapaian kinerja tersebut agar terciptanya kenyamanan dalam berlalu lintas dan peningkatan mobilitas barang dan manusia.

**Tabel 3.15**  
**Data Kapal Yang Terdaftar Sesuai Jenis Kapal (GT.1 - GT.6)**

No.	Jenis Kapal	Jumlah
1	Kapal Motor	779
2	Kapal Nelayan	9
3	Tongkang	44
4	Speed Boat	234
<b>Jumlah</b>		<b>1.066</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Inhil

**Tabel 3.16**  
**Data Penumpang Angkuta Udara di Kabupaten Indragiri Hilir**

Tang gal	Bandar a Asal- Tujuan	Operat or	Berjadwal/ Tdk Berjadwal	Ty pe A/ C	Kapasi tas Kursi	Pesaw at Datan g	Pesawa t Berang kat	Penumpang Datang		Penumpang Berangkat	
								Dewa sa	Ana k dan Bay i	Dewa sa	Ana k dan Bay i
8 Jan 2021 s.d 24 Nov 2021	PKU- Satpel BU Tempul ing (PP)	PT. ASI PUDJI ASTUT I	Berjadwal (Perintis)	C- 20 8 B	12	49	49	58	2	81	7

Beberapa faktor yang penting untuk dilakukan kedepannya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir selaku Perangkat Daerah penanggung jawab terhadap ketercapaian indikator kinerja peningkatan mobilitas barang dan orang, antara lain :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidang perhubungan.
2. Peningkatan pelayanan angkutan barang dan orang yang melintas di Jalan Kabupaten.
3. Pengujian kendaraan bermotor yang harus dilaksanakan.
4. Adanya anggaran yang memadai untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik di lingkungan pemerintah kabupaten maupun provinsi dan BPTD wiayah IV dalam rangka pembangunan dan penataan transportasi kabupaten Indragiri Hilir.
6. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang adan dalam rangka pembinaan, evaluasi dan monitoring serta penanganan masalah pembangunan di bidang perhubungan.
7. Peningkatan pendapatan asli daerah dari semua sektor yang menjadi kewenangan dinas perhubungan kabupaten Indragiri Hilir dengan selalu berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
8. Pengamanan asset yang dimiliki agar terjaga dan terawat dengan baik.



## Rata-rata Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Wilayah

Target rata-rata Persentase capaian wilayah pada tahun 2020 adalah 63,37 dengan realisasi sebesar 48,44 atau capaian sebesar 76,44%, sementara pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 68,69 dengan realisasi sebesar 57,00 atau capaian sebesar 82,98. Artinya pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 6,54%.

## Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik

Berdasarkan UU No. 38/2004 tentang jalan, status jalan menurut wewenang pengelolaan jalan dipisahkan menjadi :

1. Jalan nasional, yaitu jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, jalan strategis serta jalan tol.
2. Jalan provinsi, yaitu jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
3. Jalan kabupaten, yaitu jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan kota, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
4. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam kota.
5. Jalan desa, yaitu jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.

Data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 menyampaikan Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2021 adalah 54,13%, atau sepanjang 644 Km, dari total panjang jalan kabupaten 1.190 Km. Kondisi ini masih sama dengan persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik pada Tahun 2020.

Keadaan kondisi jalan Kabupaten dikabupaten Indragiri Hilir dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel 3.17**  
**Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2021**

No	Infrastruktur	Kondisi Jalan				
		Jumlah	kondisi			
		Km/ Unit	Mantap	Km/ Unit	Tidak Mantap	Km/ Unit
1.	Jalan	1.190.594	54,13%	644	45,87%	546

Pemerintahan yang Berwenang Mengelola	Panjang Jalan Menurut Pemerintahan yang Berwenang Mengelola (km)		
	2017	2018	2019
Jalan Provinsi	467,23	467,23	467,23
Jalan Negara	214,23	214,23	214,23
Jalan Kabupaten	1 198,54	1 190,59	1 190,59
Indragiri Hilir	1 880,00	1 872,05	1 872,05

Sumber : BPS Inhil

Jumlah anggaran pada kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jalan di wilayah kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.18**  
**Penganggaran Pembangunan Jalan Tahun 2021**

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Pengelolaan Leger Jalan	416.478.300	369.687.935	88,76%
2.	Pembangunan Jalan	4824221069	3182131088	65,96%
3.	Rekonstruksi Jalan	18.842.018.200	12.554.430.092	66,63%
4.	Rehabilitasi Jalan	1.883.694.800	1.157.730.479	61,46%

**Tabel 3.19**  
**Capaian Kinerja Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian (%)	Tahun 2021		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	61,79	61,00	98,72	65,74	54,13	82,33

Target Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2020 adalah 61,79 dengan realisasi sebesar 61,00 atau capaian sebesar 98,72%, sementara pada tahun 2021





ditargetkan sebesar 65,74 dengan realisasi sebesar 54,13 atau capaian sebesar 82,33. Artinya pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 16,39%.

### Persentase Jumlah Jembatan Kabupaten Kondisi Baik

Berdasarkan UU 38 Tahun 2004 bahwa jalan dan jembatan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah. Jembatan dalam kondisi baik artinya suatu kondisi yang memberikan gambaran fasilitas jembatan yang dibuat untuk mendukung segala aktivitas dan kegiatan masyarakat umum dalam kehidupan manusia yang berkondisi baik sampai sedang.

Data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 menyampaikan bahwa terdapat 732 unit jembatan yang ada di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dengan jumlah jembatan dalam kondisi baik 533 Unit (81,28%) dan kondisi jembatan kurang baik 199 unit (18,72%).

**Tabel 3.20**  
**Kondisi Jembatan Kabupaten Tahun 2021**

No	Infrastuktur	Kondisi Jembatan				
		Jumlah	kondisi			
		Unit	Mantap	Unit	Tidak Mantap	Unit
1.	Jembatan	732	81,28%	533	18,72%	199

Jumlah anggaran pada kegiatan dan rehabilitasi jembatan di wilayah kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.21**  
**Penganggaran Pembangunan Jembatan dan Rehabilitasi Jembatan Tahun 2021**

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Pembangunan Jembatan	3.520.039.650	860.555.930	24,44%
2.	Rehabilitasi Jembatan	1.599.246.399	1.186.234.988	74,17%

Capaian Kinerja Persentase Jumlah Jembatan dalam kondisi baik di kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel 3.22**  
**Capaian Kinerja Persentase Jumlah Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian (%)	Tahun 2021		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	58,32	44,96	77,09%	60,32	49,02	81,28%

Sumber data : LKJIP DINAS PUTR (diolah)

Target Persentase Jumlah Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik pada tahun 2020 adalah 58,32 dengan realisasi sebesar 44,96 atau capaian sebesar 77,09%, sementara pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 60,32 dengan realisasi sebesar 49,02 atau capaian sebesar 81,28. Artinya pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,1%.

#### Tujuan ke-3

### 2) Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam yang lebih Produktif dan Berwawasan Lingkungan

Sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan perundangan, terutama dalam mendorong investasi pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Prinsip-prinsip tersebut saling sinergis dan melengkapi dengan pengembangan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mendasarkan pada asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang mendorong upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, agar sumber daya alam dapat bermanfaat dalam waktu yang panjang maka perlu dilakukan pengelolaan Sumber Daya Alam yang lebih Produktif dan Berwawasan Lingkungan.

Tujuan ke-3 pada capaian kinerja Kabupaten Indragiri Hilir adalah Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam yang lebih Produktif dan Berwawasan Lingkungan dengan 2 sasaran strategis, yaitu : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian, Perkebunan, Perdagangan, Industri dan Pariwisata terhadap perekonomian daerah, meningkatnya mutu



lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam. Tujuan ke-3, diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, Indeks Inovasi Daerah, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

**Tabel 3.23**  
**Capaian Kinerja Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam yang lebih Produktif dan Berwawasan Lingkungan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian (%)	Tahun 2021		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persentase	4.30	3.49	81%	4.44	4.01	90,31%
2	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	N/A	N/A		2.476	2.411	106%
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	61,28	57,79	94,30%	61,85	64,79	104,75%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>89,87%</b>			<b>100,35%</b>

Sumber data : Bagian Organisasi (diolah)

Berdasarkan data capaian kinerja di atas, Rata-rata capaian Kinerja tahun 2020 adalah 89,87% dan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 100,35%, artinya Capaian Kinerja pada tahun 2021 mengalami Peningkatan Sebesar 20,48% Untuk rincian analisis capaian setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut ini :

#### **Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, baik di tingkat wilayah provinsi maupun kabupaten atau kota digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga perubahan PDRB yang terjadi ditingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya.

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Keadaan ekonomi suatu daerah dapat terlihat dari PDRB daerah tersebut. PDRB dapat mencerminkan kondisi dan pencapaian aktivitas atau kinerja perekonomian daerah. Gambaran perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari nilai nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut. Nilai nominal PDRB menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi



yang dapat dikelola oleh suatu daerah atau dengan kata lain seberapa besar nilai tambah/jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dapat dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Capaian kinerja laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Tahun 2020 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 3.24**  
**Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian (%)	Tahun 2021		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persentase	4.30	3.49	81%	4.44	4.01	90.3%

Sumber data : BPS Kabupaten Indragiri Hilir

Pada Tahun 2021, target capaian kinerja laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan target pertumbuhan sebesar 4,44% sementara terealisasi hanya sebesar 4,01% artinya ada penurunan angka pertumbuhan sebesar 0,43% dari target.

Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian Tahun 2021 dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- **produksi sektor pertanian**, dengan target 117.310 ton namun capaian realisasinya hanya 94.757,3 ton atau dengan persentase capaian sebesar 80,78 %.

Dibandingkan pada Tahun 2020 produksi sektor pertanian, realisasinya mencapai 112,245 ton dengan capaian 97,24 %. Artinya ada penurunan jumlah produksi sektor pertanian Tahun 2021 dari tahun sebelumnya sebesar 16,46 %.

Dampak Pandemi Covid-19 yang mengharuskan terjadinya pengurangan anggaran yang besar, mengakibatkan program kegiatan yang sudah di targetkan yang bisa mendorong peningkatan produksi pertanian tidak berjalan dengan maksimal. Selain itu luas lahan tanam yang semakin berkurang dan kondisi iklim pasang rob yang mengakibatkan lahan tanam tergenang dan tanaman mati.

Hal ini perlu dilakukan optimalisasi teknologi pertanian dan sumber daya pertanian agar dapat menggenjot produksi pertanian di masa yang akan datang. Untuk meningkatkan produksi sektor pertanian perlu dilakukan kebijakan antara lain:

1. Kebijakan Meningkatkan Infrastruktur Pertanian.
2. Kebijakan Memperkuat Kelembagaan Pertanian.
3. Kebijakan Memperkuat SDM Pertanian.



Secara umum pencapaian realisasi kinerja pembangunan sektor pertanian tersebut cukup baik berkat terlaksananya kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan pertanian.

Laju pertumbuhan PDRB sektor perikanan Tahun 2021 dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. **Jumlah produksi perikanan tangkap**, dengan target 79.000 ton, realisasi 60.300,35 atau dengan persentase 76,37 %. Dibandingkan dari Tahun 2020 realisasi pencapaian 70,70 %, artinya pencapaian realisasi lebih baik atau mengalami sedikit kenaikan dengan angka persentase sebesar 5,67 %. Hal ini karena didukung dengan adanya dana penganggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan produksi perikanan tangkap.
- b. **Jumlah produksi perikanan budidaya** dengan target 4.500 ton, realisasi 2.484,98 atau dengan persentase 55,23 %. Dibandingkan pada tahun sebelumnya capaian persentasenya mengalami penurunan 11,31 % yang mana pada Tahun 2020 capaian realisasinya mencapai 66,54. Pengurangan anggaran menjadi penyebab belum optimalnya produksi perikanan budidaya. Minimnya dana yang tersedia pada pengadaan beberapa barang hibah untuk para nelayan dan pembudidaya ikan dikarenakan adanya rasionalisasi yang hampir mencapai 50 % dari pagu anggaranyang diperuntukkan untuk membantu pandemi Covid-19. Dimasa yang akan datang diharapkan dana yang digelontorkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak lagi pengurangan anggaran yang signifikan. Selain itu Adapun solusinya bagi para nelayan dan budidaya diharapkan terus dapat bertahan pada saat Pandemi Covid-19 dengan menggunakan peralatan alat tangkap ataupun alat budidaya yang tersedia.
- c. **Jumlah konsumsi ikan di masyarakat** dengan target 39.90 kg , realisasi 42.83 kg atau dengan persentase 107,35 %. Dibandingkan pada Tahun 2020 jumlah konsumsi ikan dimasyarakat mencapai 99,84 %. Artinya pada Tahun 2021 mengalami kenaikan persentase sebesar 7,51 % dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan yang diharapkan menjadi salah satu sumber protein utama dalam pola konsumsi. Tingkat konsumsi ikan yang kecil dapat mempengaruhi keberlangsungan industri pengolahan ikan dan kesejahteraan nelayan. Semoga kesadaran akan konsumsi ikan masyarakat dapat dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi

## Indeks Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Daerah. Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran



serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah. Penyelenggaraan Inovasi Daerah terdiri atas (a) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan (b) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.



Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional RI, bahwa Kabupaten Indragiri Hilir, Data Indeks Daya saing daerah wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2021, Nilai Scor Indeks : 2.411 dengan target 2.276 dengan keberhasilan capaian 106 %. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berhasil masuk pada 10 besar dalam Indeks daerah yang sangat inovatif.

Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 002.6-5848 tahun 2021 tentang indeks inovasi daerah provinsi, kabupaten dan kota se Indonesia. Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021, dari 415 Kabupaten yang terdata pada indeks inovasi daerah, Inhil tercatat sebagai kabupaten yang sangat inovatif dengan nomor urut 7 dari 17 kabupaten yang masuk dalam kategori kabupaten sangat inovatif.

Sesuai Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 002.6/3363/SJ tanggal 08 Juni 2021 perihal Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan



Inovative Government Award (IGA) 2021. Telah menetapkan Skor dan Indeks Inovasi Daerah tahun 2021 dan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.25**  
**Skor dan Kategori Indeks Inovasi Daerah tahun 2021**

Kategori	Skor
Sangat Inovatif	60,00 – 100,00
Inovatif	30,00 – 59,99
Kurang Inovatif	0,00-29,99
Tidak dapat dinilai	0

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2021, untuk Kategori Kabupaten, skor indeks inovasi daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu 62.42 (kategori : sangat inovatif).

Pada tahun 2020 hanya ada 8 (delapan) Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan dokumen inovasi ke Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dengan jumlah 9 (sembilan) inovasi kedalam system indeks inovasi daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2021 Kabupaten Indragiri Hilir melalui Bidang Litbang telah mengirimkan 68 inovasi dari 54 organisasi perangkat daerah termasuk Kecamatan dan Rumah Sakit Daerah, sehingga mencapai 100%, untuk mengikuti lomba Inovasi Government Award (IGA) Tahun 2021 dan berhasil mendapat Penghargaan dalam kategori Pemerintah Daerah sangat inovatif.

Adapun inovasi daerah di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :

1. **E-Monev" (Pelaporan Evaluasi Fisik dan Keuangan Secara Elektronik)**

Sistem Monitoring Fisik dan Keuangan secara elektronik merubah pelaporan secara manual menjadi pelaporan Elektronik Secara Online. Aplikasi *Emonev* terintegrasi dengan Aplikasi SIPKD pada BAKD

2. **INOVASI DAERAH "SI KAPAL LAYAR" (Sitem Informasi Kas dan Pencairan Digital Langsung Bayar)**

"SI KAPAL LAYAR" (Sistem Informasi Kas dan Pencairan Digital Langsung Bayar) pelayanan kepada Perangkat daerah dengan cara bendahara perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tidak lagi harus datang langsung ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan pencairan.

3. **INOVASI "PIDADA INHIL" (Peningkatan Pendapatan Asli Daerah)**

Inovasi PIDADA Inhil adalah konsep Inovasi Daerah yang digagas oleh Badan Pedapatan Daerah Kabupaten indragiri hilir.

4. **INOVASI "SI KUDA" (Sistem Informasi Kepegawaian Umum dan Data)**



- SI Kuda adalah untuk Inovasi BKPSDM Kabupaten Indragiri Hilir Untuk mendukung penyelenggaraan manajemen, penyimpanan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ASN berbasis kompetensi.
5. **INOVASI DAERAH "LAYANAN KOPI INHIL" (Layanan Konsultasi Online Pengawasan Intern Kabupaten Indragiri Hilir)**  
Layanan kopi (Konsultasi Online Pengawasan Intern) merupakan merupakan sebuah Inovasi yang Dibangun oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
  6. **INOVASI "SI PAPA KU" (Aplikasi Pendamping Penatausahaan Keuangan)**  
"SI PAPA KU" yakni Aplikasi Pendamping Penatausahaan Keuangan dilingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari 11 (Sebelas) Bagian dan masing-masing Bagian memiliki Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengatur penatausahaan keuangan untuk masing-masing bagian di Sekretariat Daerah tersebut.
  7. **INOVASI DAERAH "BIORE" (Bilik Video Conference)**  
Bilik/Ruang Rapat Virtual "BIORE" (Bilik Video Conference) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebuah terobosan dalam hal penyediaan Sarana dan Prasarana bagi Pemerintah dan Masyarakat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi secara virtual melalui Aplikasi Video Conference..
  8. **INOVASI DAERAH "TERAS KITA" (Tim Percepatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Bagian Organisasi.**  
TERAS KITA" (Tim Percepatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tim ini guna meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dalam rangka percepatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terselenggara secara optimal, efektif dan efisien.
  9. **INOVASI DAERAH "FOKUS PBJ" (Forum Komunikasi dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa)**  
Fokus PBJ adalah forum komunikasi dan informasi pengadaan barang/jasa yang mana maksud dan tujuan dari dibentuknya Fokus PBJ ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari pelaku pengadaan barang/jasa.
  10. **INOVASI DAERAH "PAMAN TRANTIB" (PASAR AMAN DAN NYAMAN BERSAMA TRANTIB)**  
Trantib Pasar adalah untuk mewujudkan Pasar sebagai tempat yang menyenangkan, diantaranya melakukan Pengelolaan Keamanan, Kebersihan, dan Edukasi pemenuhan hak-hak Konsumen.
  11. **INOVASI DAERAH "TIPEKK" (Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan)**  
Inovasi TIPEKK (Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan) sebagai salah satu langkah dalam mewujudkan peningkatan efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kecamatan





12. **INOVASI DAERAH "TIM SI CEPAT PEDULI HAM" (TIM KOORDINASI PERCEPATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PEDULI HAM)**  
Tim Koordinasi Percepatan Kabupaten Indragiri Hilir Peduli Ham suatu terobosan dalam rangka Perwujudan Kabupaten Indragiri Hilir menjadi Kabupaten Peduli HAM.
13. **INOVASI DAERAH "SIMPEL" (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Elektronik)**  
Inovasi TIPEKK (Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan) sebagai salah satu langkah dalam mewujudkan peningkatan efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kecamatan.
14. **INOVASI DAERAH "TIM KAPE MUDA" (TIM KOORDINASI PENYAMBUTAN TAMU DAERAH) TIM KAPE MUDA** (Tim Koordinasi Penyambutan Tamu Daerah) Produk Inovasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berperan penting dalam penyambutan tamu daerah sehingga Tamu Daerah akan merasa Nyaman dan Aman berada di Kabupaten Indragiri Hilir.
15. **INOVASI DAERAH "TIM PERSADA" (Tim Percepatan Kerjasama Daerah)**  
TIM PERSADA (Tim Percepatan Kerja Sama Daerah) bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik.
16. **INOVASI DAERAH "TIM TREMBESI" (TIM PERCEPATAN PELAYANAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI)**  
"TIM TREMBESI" (Tim Percepatan Pelayanan Pelatihan Berbasis Kompetensi), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir. bertujuan dalam rangka meningkatkan kompetensi para pencari kerja di Kabupaten Indragiri Hilir.
17. **TIM SIRTU (PENYISIR PERATURAN)**  
TIM SIRTU (PENYISIR PERATURAN) Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi Karyawan dan Pengunjung RSUD Puri Husada Tembilahan.
18. **INOVASI "LAPOR URC SAJA" (LAYANAN Pengaduan On-line Rakyat Unit Reaksi Cepat Satuan Polisi Pamong PraJA)**  
Unit Reaksi Cepat Praja Wibawa untuk mengakomodir layanan pengaduan masyarakat tentang gangguan tibus mapun pelanggaran perda dan perkara sehingga dapat lebih cepat direspon melalui digitalisasi Layanan URC *website* <https://satpolpp.inhilkab.go.id/> ternotifikasi melalui *whatsapp* admin Unit Reaksi Cepat Satuan Polisi Pamong Praja.
19. **INOVASI "NASI UDUK INHIL" (Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan di Kabupaten Indragiri Hilir)**  
"NASI UDUK INHIL" yaitu Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan di Kabupaten Indragiri Hilir. Pelayanan NASI UDUK INHIL memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa dan Kelurahan mengurus Dokumen Kependudukan di Kantor Desa dan Lurah.
20. **INOVASI DAERAH "DEMI TUAN INHIL" (Dermaga Miring Untuk Anak Negeri Indragiri Hilir)**



"DEMI TUAN INHIL" (Dermaga Miring Untuk Anak Negeri Indragiri Hilir) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, Guna memberikan kemudahan kepada Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.

21. **INOVASI "PIAGAM PUALAM" (Pelayanan Prima 3 Jam Pengurusan Izin Reklame)**

PIAGAM PUALAM (Pelayanan Prima Tiga Jam Pengurusan Izin Reklame) adalah inovasi layanan yang dirancang oleh DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hilir khusus pengurusan izin reklame dalam jangka waktu yang lebih cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan kemudahan dari alur teknis izin reklame itu sendiri.

22. **INOVASI DAERAH "SI KANCIL INHIL" (Sistem Informasi Komunitas Adat Terpencil Kabupaten Indragiri Hilir)**

"SI KANCIL INHIL" (Sistem Informasi Komunitas Adat Terpencil Kabupaten Indragiri Hilir) merupakan suatu terobosan yang membawa perubahan Tataan Kehidupan dan Perilaku Sosial Suku Anak Dalam kearah yang lebih baik dan layak sebagai mana Tataan Kehidupan Masyarakat pada umumnya.

23. **INOVASI "PUSPA BERSERI" (Puskesmas Peduli Aids Masyarakat Sehat dan Mandiri)**

Inovasi Pelayanan Puspa Berseri (Puskesmas Peduli AIDS Masyarakat Sehat dan Mandiri) melalui Program posyandu ODHA dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas hidup ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

24. **INOVASI DAERAH "TEMAN SEHATI" (Tanah Merah Menjemput Pelayanan Kesehatan Daerah Pesisir)**

"Teman Sehati (Tanah Merah Menjemput Pelayanan Kesehatan Daerah Pesisir) Tim kerja yang beranggotan dari unsur pemerintah Kecamatan dan pihak puskesmas yang ada di kecamatan tanah merah.

25. **INOVASI DAERAH "SULTAN" (SISTEM KEMUDAHAN LAYANAN TATA RUANG)**

"SULTAN" (Sistem Kemudahan Layanan Tata Ruang). Pelayanan ini dapat dimanfaatkan dan diakses langsung tanpa harus datang ke kantor untuk mendapatkan pelayanan, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Administrasi Pelayanan Tata Ruang bagi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir . meliputi :

1. Pengaturan dan pembinaan penataan ruang.
2. Perencanaan tata ruang.
3. Pemanfaatan ruang.

26. **INOVASI DAERAH "SI PRIMA 15 Menit" (Inovasi Pelayanan Ramah, Menyenangkan, Akurat dan Cepat 15 Menit)**

"SI PRIMA 15 Menit" yang merupakan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dengan memanfaatkan Aplikasi *Whatsapp*



serta membentuk Jaringan Informasi Pelayanan Publik Kecamatan Kemuning berupa Website Resmi Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

**27. INOVASI DAERAH "SOP PAIS UMI" (Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Usaha Mikro)**

INOVASI DAERAH "SOP PAIS UMI" (Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Usaha Mikro) Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir  
Tujuan Inovasi :

1. Mempermudah dalam pengajuan berkas calon penerimaan BPUM.
2. Meningkatkan jumlah pelaku usaha mikro yang terdata disetiap Kecamatan.
3. Menjadi wadah dalam mengusulkan bantuan BPUM kepada pelaku usaha mikro.

**28. INOVASI DAERAH "POS KEAMANAN TERPADU SATU ATAP (BABINSA DAN BHABINKAMTIBMAS)"**

Inovasi Daerah "Pos Keamanan Terpadu Satu Atap (Babinsa Dan Bhabinkamtibmas)" Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Pelayanan Terintegrasi Antara Pemerintah Desa

**29. INOVASI DAERAH "PERMATA TRC-19"(Pemutus Rantai Tim Reaksi Covid-19) "Permata TRC-19" (Pemutus Rantai Tim Reaksi Covid -19) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**

**30. INOVASI DAERAH "GERAKAN SATU HATI PEDULI STUNTING DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR"**

Gerakan Satu Hati Kabupaten Indragiri merupakan suatu kegiatan yang amat penting dalam menggebrak Desa dan Kelurahan supaya sadar dan peduli terhadap persoalan stunting.

**31. INOVASI DAERAH "KELAPA MUDA" (Komunikasi Elektronik Pelayanan Prima, Mudah dan Akurat)**

"KELAPA MUDA" yang merupakan singkatan dari "Komunikasi Elektronik Pelayanan Prima, Mudah dan Akurat". Inovasi "KELAPA MUDA" Kecamatan Enoki ini memanfaatkan Aplikasi Whatsapp serta membentuk Jaringan Informasi Pelayanan Publik Kecamatan Enok berupa Website Resmi Kecamatan Enok.

**32. INOVASI DAERAH "D' Bumil O" (Data Ibu Hamil Online)**

Inovasi Data Ibu Hamil Online hadir dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat di Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

**33. INOVASI DAERAH "SALAMAN" (Satuan Relawan Pemadam Kebakaran)**

'SALAMAN" merupakan Satuan yang dibentuk dalam rangka mendukung Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang terjadi di masyarakat. Satuan ini diinisiasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.



**34. INOVASI DAERAH "SAGU MANDAH" (Inovasi Sistem Akuntabilitas Guna Untuk Masyarakat Lebih Mudah)**

"INOVASI SAGU MANDAH (Inovasi Sistem Akuntabilitas Guna Untuk Masyarakat Lebih Mudah)". Sagu Mandah merupakan sebuah inovasi Pelayanan Publik berbasis digital dalam bentuk Website Resmi Kecamatan Mandah dengan mengusung Pelayanan Publik yang Efektif, Efsien, Transparansi dan Akuntabel.

**35. INOVASI DAERAH "SAPA RASA" (Sapa Pasien, Rangkul Dengan Santun)**

TIM "SAPA RASA " yang merupakan Singkatan dari "Sapa Pasien, Rangkul Dengan Santun". Inovasi SAPA RASA (Sapa Pasien, Rangkul Dengan Santun) merupakan bentuk inovasi pelayanan publik berupapelayanan langsung kepada pasien dengan mengedepankan mutu pelayanan yang santun dalam rangka memberikan kepuasan kepada pasien yang di rawat di RSUD Raja Musa Guntung.

**36. INOVASI DAERAH "PATEN PEPES" (Pelayanan Andmistrasi Terpadu Kecamatan Spesial Pesisir)**

INOVASI DAERAH "PATEN PEPES" (Pelayanan Andmistrasi Terpadu Kecamatan Spesial Pesisir) Kecamatan Sungai Batang MERUPAKAN terobosan dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik yang lebih Efsien, Efektif, Transparan dan AKuntabel.

**37. INOVASI DAERAH "TANAM KELAPA" (TAMU SENANG, NYAMAN, KEAMANAN DAN PELAYANAN PRIMA)**

Inovasi Daerah "Tanam Kelapa" (Tamu Senang, Nyaman, Keamanan Dan Pelayanan Prima), merupakan Inovasi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung tamu Bupati Indragiri Hilir dengan menghadirkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

**38. INOVASI DAERAH "SIMPIDADE & KIAMBANG" (Sistim Informasi Pelayanan Dari Desa & Kelurahan, Inovatif, Murah, Berkualitas, Menyenangkan)**

"SIMPIDADE & KIAMBANG" (Sistim Informasi Pelayanan Dari Desa dan Kelurahan Inovatif Mudah Berkualitas dan Menyenangkan) Pendataan ini dilakukan dengan memberdayakan Para Kader Posyandu dan Bidan-bidan Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Tempuling.

**39. INOVASI DAERAH "ADA SI UDIN OCIT" (Administrasi Surat Izin Dispensasi Nikah Online Bagi Calon Pengantin)**

ADA SI UDIN OCIT (Administrasi Surat Izin Dispensasi Nikah Online Bagi Calon Pengantin) merupakan Program Inovasi Kecamatan Tembilahan Hulu yang berbasis digital menggunakan Website dan dukungan Aplikasi WhatSapp sebagai media pelayanan berbasis online.

**40. INOVASI DAERAH "INTI RETEH" (Registrasi Online Surat Pindah di Kecamatan Reteh)**

"INTI RETEH" yakni Inovasi dalam hal Registrasi Online Surat Pindah. Inovasi ini di dukung dengan Layanan Informasi dan Komunikasi berbasis digital melalui Media Website dan



Aplikasi WhatSapp Inovasi ini dibuat dalam rangka memudahkan masyarakat di Kecamatan Reteh dalam meminta Layanan Publik, hal ini dikarenakan letak Geografis Kecamatan Reteh.

**41. INOVASI DAERAH "INVEST" (Inovasi Pengurusan Surat Tanah)**

Inovasi Kepengurusan Surat Tanah (INVEST) dengan pola layanan secara online serta pengarsipan digital terhadap dokumen-dokumen pengurusan surat tanah, sehingga pelayanan menjadi lebih efisien, efektif, transparan dan bebas pungli.

**42. INOVASI DAERAH "KORSI PANAS" (Kontak Informasi Pelayanan Akuntabel dan Sistematis)**

Inovasi "KORSI PANAS" atau Kontak Informasi Pelayanan Akuntabel dan Sistematis ini merupakan Inovasi berupa Layanan Publik berbasis digital yang memanfaatkan kecanggihan teknologi Smartphone dan Website yang dapat diakses oleh masyarakat dalam memperoleh informasi terkait pelayanan publik di Kecamatan Keritang.

**43. INOVASI DAERAH "SAPAT" (Sistem Administrasi Pelayanan Akuntabel Terintegrasi)**

"SAPAT" yaitu "Sistem Administrasi Pelayanan Akuntabel Terintegrasi" hadir sebagai solusi dalam penerapan Pelayanan Publik berbasis Digital dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi informasi berbasis online. "Link Kontak Whatsapp Pelayanan Publik" yang telah di sediakan oleh Pemerintah Kecamatan Kuala Indragiri.

**44. INOVASI "LAYANAN SIAAP" PRODUK INOVASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

"SIAAP" yaitu Sistem Aplikasi Administrasi Produk Hukum Daerah, sebagai Inovasi Tata Kelola Pemerintahan yang menjadi kewenangan tugas dan fungsi dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir.

**45. INOVASI DAERAH "BU KIA PERTAMA" (Buku Kesehatan Ibu dan Anak Menjadi Persyaratan Tambahan Masuk Sekolah)**

Inovasi "Bu KIA PERTAMA" yakni Buku Kesehatan Ibu dan Anak Menjadi Persyaratan Tambahan Masuk Sekolah di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.

**46. INOVASI DAERAH "TALI SERAT" (Taman Literasi Sekolah dan Masyarakat)**

Inovasi "TALI SERAT" yaitu Taman Literasi Sekolah dan Masyarakat sebagai bentuk Inovasi Pelayanan Publik dibidang Perpustakaan dan Kearsipan. Melalui Inovasi "TALI SERAT" (Taman Literasi Sekolah dan Masyarakat), Dinas Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

**47. INOVASI DAERAH "KODOK'S MELONCHAT" (Konsultasi Dokter Spesialis Melalui Telepon dan Chat) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TENGKU SULUNG PULAU KIJANG.**

Inovasi "KODOK'S MELONCHAT" (Konsultasi Dokter Spesialis Melalui Telepon dan Chat) sebagai produk inovasi pelayanan Kesehatan RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang Kabupaten Indargiri Hilir.



48. **INOVASI DAERAH "SIKES" (Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan Secara Online)**  
Inovasi Pelayanan Publik Online yaitu "SIKES" atau singkatan dari Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan Secara Online. Melalui Inovasi "SIKES" masyarakat Kecamatan Kempas tidak perlu lagi datang ke Kantor Camat Kempas.
49. **INOVASI DAERAH "SI PELANGI PAGI" (Sistem Pengaduan dan Layanan Administrasi Pelangiran Penggunaan Aktif Teknologi)**  
"SI PELANGI PAGI" yaitu Sistem Pengaduan dan Layanan Administrasi Pelangiran Penggunaan Aktif Teknologi Inovasi ini dibuat dalam rangka memudahkan masyarakat di Kecamatan Pelangiran dalam meminta Layanan Publik, hal ini dikarenakan letak Geografis Kecamatan Pelangiran yang berada di peisir Kabupaten Indragiri Hilir.
50. **INOVASI DAERAH "SLIP" (Sistem Layanan Informasi Perkim)**  
Inovasi "SLIP" (Sistem Layanan Informasi Perkim) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
51. **INOVASI DAERAH "JAM TANGAN" (Jaga Kampung Dengan Semangat Gotong Royong)**  
Inovasi "JAM TANGAN" (Jaga Kampung Dengan Semangat Gotong Royong) merupakan Inovasi Bentuk Lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.
52. **INOVASI DAERAH "SIPETUS" (SISTEM PENGADUAN TUMPUKAN SAMPAH)**  
"SiPeTuS" (Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah) sebagai sebuah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
53. **INOVASI DAERAH "KELAPA KOPYOR BISA" (KEGIATAN PENGOLAHAN PANGAN KOMODITAS PERTANIAN YANG BERORIENTASI BISNIS AGRO)**  
Inovasi Daerah "Kelapa Kopyor Bisa" (Kegiatan Pengolahan Pangan Komoditas Pertanian Yang Berorientasi Bisnis Agro).
54. **INOVASI DAERAH "TIM SIBER" (Tim Penyisir Kebersihan)**  
"TIM SIBER" atau Tim Penyisir Kebersihan sebagai Inovasi Pelayanan Publik oleh Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
55. **INOVASI GAMBAS CEK MINAH (Gambut Basah Cegah Kebakaran Lahan Masyarakat Indragiri Hilir)**  
"GAMBAS CEK MINAH" (Gambut Basah Cegah Kebakaran Lahan Masyarakat Indragiri Hilir). Pembangunan Sekat Kanal dalam upaya mencegah kebakaran lahan masyarakat di Indragiri Hilir.
56. **INOVASI DAERAH "INHIL TERBILANG" (Indragiri Hilir Terdapat Bibit Kelapa Sri Gemilang) TIM SIRTU (PENYISIR PERATURAN)** Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi Karyawan dan Pengunjung RSUD Puri Husada Tembilahan.



57. **INOVASI "SI ATAH PADI" (Sidang Istbat Nikah Terpadu Kabupaten Indragiri Hilir)**  
Inovasi SI ATAH PADI (Sidang Istbat Nikah Terpadu Kabupaten Indragiri Hilir) upaya melindungi perempuan dan anak di Kabupaten Indragiri Hilir”.
58. **INOVASI DAERAH "POPAI" (PENGEMBANGAN POTENSI PADI INDRAGIRI HILIR) POPAI**  
(Potensi padi Indragiri Hilir) Karandukuh, di harapkan bisa menjadi solusi penyelamatan Padi Unggul lokal dan Peningkatan produksi padi unggul lokal, sehingga bisa menjadi varietas unggul lokal yang di akui secara nasional.
59. **INOVASI PEMANFAATAN AIR BUDIDAYA LELE BIOFLOK**  
Inovasi Pemanfaatan Air Budidaya Lele Bioflok Untuk Tanaman Inovasi ini adalah dengan Air Buangan Lele Bioflok yang di dimanfaatkan sebagai pengganti pupuk kimia pada tanaman atau dengan mengedepankan Pupuk Organik Cair (POC) sebaga limbah dari Budidaya Lele Bioflok.
60. **OPTIMALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI INFORMASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT (InPas) TV DIGITAL**  
InPAS adalah aplikasi yang digunakan sebagai Portal Informasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Masyarakat.
61. **INOVASI DAERAH "BUMD KIG" UNTUK STABILITAS HARGA KELAPA**  
Inovasi Daerah "BUMD KIG" Untuk Stabilitas Harga Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir mendirikan Badan Usaha Milik Daerah, yang akan mengelola Resi Gudang Kopra di Kabupaten Indragiri Hilir.
62. **INOVASI DAERAH "LOGO INHIL NAN MOLEK"**  
Inovasi Daerah "Logo Inhil Nan Molek“, merupakan Branding Pariwisata Kabupaten Indragiri hilir.
63. **INOVASI DAERAH "TIM INFORMASI CAKRA" (Cepat, Akurat, Kredibel, Respon dan Akuntabel)**  
CAKRA merupakan singkatan dari "Cepat, Akurat, Kredibel, Responsif dan Akuntabel". Inovasi Cakra merupakan upaya melakukan terobosan untuk mendapatkan bahan keterangan dan informasi secara cepat, tepat, akurat dan dapat di pertanggungjawabkan dengan cara memanfaatkan Informasi Teknologi.
64. **INOVASI DAERAH "WARDAN-MBAK IKHA" (Warga Damai, Aman, Membangun Kampung Indah, Kreatif, Harmonis, dan Asri)**  
"WARDAN MBAK IKHA" atau yang disingkat dengan (Warga Damai Aman Membangun Kampung Indah Kreatif Harmonis Dan Asri) Kecamatan Teluk Belengkong.
65. **INOVASI DAERAH "PANTAI CERMIN" (Pelayanan Tani Cerdas, Cermat dan Integrasi)**  
PANTAI CERMIN” yaitu Pelayanan Tani Cerdas, Cermat, sebagai wujud Peran Kecamatan dalam meningkatkan kesejahteraan Petani melalui Program Pemberdayaan Petani Lokal dengan dukungan dari Penyuluh Pertanian serta masyarakat.



66. **INOVASI DAERAH "GEMMAR MENGAJI" (GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI)**  
Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Indragiri Hilir,
67. **INOVASI DAERAH "SI DAYANG" (Inovasi Jurnal Ilmiah Selodang Mayang)**  
Jurnal "SELODANG MAYANG" sebuah rangkuman Karya Ilmiah dari beberapa hasil penelitian dan hasil penelitian tersebut menjadi sebuah rekomendasi Ilmiah dari Para Peneliti Ilmiah tersebut, akan menjadi rujukan pokok bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
68. **INOVASI DAERAH "TIM KOORDINASI PERCEPATAN KAMPUNG QUR'ANI"**  
Inovasi Daerah "Tim Koordinasi Percepatan Kampung Qur'ani" merupakan tindak lanjut program Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

### Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan tahun tertentu. Tujuan digunakannya indikator ini adalah sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik terkait pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

**Tabel 3.26**  
**Capaian indicator Sasaran Strategis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 - 2021**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61.28	57.79	94.30	61.85	64.79	104.75

Sumber data : LKJIP DLHK Tahun 2021

Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 secara umum mengalami peningkatan sebesar 104.75 % dengan target 61.85 dan realisasi sebesar 64.79. jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan tingkat realisasi capaian mengalami kenaikan sebesar 10 %.





**Tabel 3.27**  
**Predikat Penilaian IKLH**

NO	Predikat	Kisaran Nilai IKLH
1	Sangat Baik	IKLH > 80
2	Baik	70 < IKLH ≤ 80
3	Cukup Baik	60 < IKLH ≤ 70
4	Kurang Baik	50 ≤ IKLH ≤ 60
5	Sangat Kurang Baik	40 ≤ IKLH ≤ 50
6	Waspada	30 ≤ IKLH ≤ 40

Sumber data : IKLH 2018, Kementerian Lingkungan Hidup

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diukur berdasarkan berdasarkan SE KLHK S.263/P3EJw/10/2015, 9 Oktober 2015 dengan rumus pembobotan 30% pada IKA, 30% pada IKU dan 40%, atau  $IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$  atau  $(30\% \times 50.00) + (30\% \times 86.63) + (40\% \times 46.11) = 64.79$  dengan Predikat **Cukup Baik**

Keterangan :

- IKA = Indeks Kualitas Air
- IKU = Indeks Kualitas Udara
- IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Secara rinci yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah :

1. Indeks Kualitas/ Pencemaran Air (bobot 30%), yang diukur berdasarkan parameter-parameter DO, TSS, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform. Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan rumus indeks perhitungan 
$$PII = \frac{\sqrt{(Ci / Lij)^2 M + (Ci / Lij)^2 R}}{2}$$
2. Indeks Kualitas / Pencemaran Udara (bobot 30%), yang diukur berdasarkan parameter-parameter SO2 dan NO2. Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan kualitas udara ambient dengan metode passive sampler di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan rumus indeks perhitungan  $IKU = 100 - (50/0,9 \times (IEU-0,1))$
3. Indeks Tutupan Hutan /Lahan (bobot 40%), Penghitungan IKTL dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratifnya yang berdasarkan pada UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap Provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari Wilayah Administratif, dengan rumus indeks perhitungan

Keterangan :

$$(TL) = \frac{TH + (LSBKH + L.SBL + RTH + KR + TK) \times 0,6}{\text{Luas Wilayah Administratif}}$$

- TL = Tutupan Lahan



- TH = Tutupan Hutan
- SBKH = Belukar dan belukar rawa kawasan hutan
- SBL = Belukar dan Belukar Rawa Sempadan
- RTH = Ruang Terbuka Hijau
- KR = Kebun Raya
- TK = Taman Keanekaragaman Hayati

**Tabel 3.28**  
**Tabel Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

No	Indikator IKLH	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	IKU (Indeks Kualitas Udara)	92,15	92,15	100,29	92,09	86,63	96,24
2.	IKA (Indeks Kualitas Air)	54,92	32,86	59,83	57,62	50,00	86,77
3.	ITH (Indeks Tutupan Lahan)	46,32	50,72	109,49	47,32	46,11	97,44
Indeks IKLH				89,87			93,48

Sumber : LKJIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Inhil Tahun 2021

Berdasarkan tabel perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Air Quality Indeks (AQI) atau Indeks Kualitas Udara merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara di suatu daerah. Setiap negara pada umumnya memiliki indeks berbeda untuk menentukan status pencemaran udara di wilayahnya. Pada tahun 2021 Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 dengan capaian 100,29% dengan target 92,15 dan realisasi 92,15.

### 2. Indeks Kualitas Air (IKA)

Nasional Sanitation foundation Water Quality Index (NSF-WQI) atau Indeks Kualitas Air ditentukan untuk menilai tingkatan kualitas air dari suatu perairan. Indeks kualitas air ini didasarkan pada 9 parameters yang mencakup : BOD, DO, Nitrate, Total Phosphate, Temperature Turbidity, Total Solids, pH, and Facel Coliform. Pada tahun 2021 Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Indragiri Hilir terjadi peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2020 yang lalu dengan capaian indikator 59,83% dari target yang telah ditetapkan 54,92 dengan realisasinya 32,86.

### 3. Indeks Tutupan Lahan (ITH)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari Indeks Tutupan Lahan (ITL) yang digunakan sebelum tahun 2017. Pada metode perhitungan Indeks Kualitas



Tutupan Lahan (IKTL) sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan Indikator Tutupan Lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Pada tahun 2021 Indeks Tutupan Lahan (ITL) di Kabupaten Indragiri Hilir terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang lalu dengan capaian indikator kinerjanya 109,49% dari target yang telah ditetapkan 46,32 dengan realisasinya 50,72.

#### Tujuan ke-4

### 3) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Membangun Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing merupakan kebutuhan yang mutlak dan mendesak serta urgent. Hal ini disebabkan karena SDM merupakan salah satu sumber daya strategis yang dimiliki, serta harus terus menerus dibina dan dikembangkan secara berkesinambungan.

Tujuan ke-4 pada capaian kinerja Kabupaten Indragiri Hilir adalah Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya saing dengan 2 sasaran strategis, yaitu : Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing beriman dan bertaqwa, dan Meningkatnya derajat Kesehatan. Tujuan ke-4, diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Rata-rata Lama Sekolah (tahun), Harapan Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup.

**Tabel 3.29**  
**Capaian Kinerja Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian (%)	Tahun 2021		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	67,53	66,54	98,53%	68,08	66,63	97,87%
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,26	7,23	99,57%	7,38	7,24	98,10%
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,76	11,91	93,33%	12,96	11,93	92,05%
4	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,00	67,85	99,78%	68,40	67,98	99,39%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>97,80%</b>			<b>96,85%</b>

Sumber data : Bagian Organisasi (diolah)

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas dapat dilihat Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 97,80 dan pada tahun 2021 sebesar 96,76%. Artinya Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 1,04 Untuk rincian analisis capaian setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut ini :



## Indeks Pembangunan Manusia

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, yang juga merupakan komponen variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan.



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolok ukur capaian kinerja mewujudkan SDM yang Berdaya Saing. IPM diukur dengan 3 dimensi dasar yakni Umur Panjang dan Hidup Sehat (Umur Harapan Hidup Saat Lahir), Pengetahuan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) dan Standar Hidup Layak (Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan).

**Tabel 3.30**  
**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian (%)	Tahun 2021		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	67,53	66,54	98,53%	68,08	66,63	97,87%

Interpretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa semakin tinggi IPM maka kualitas hidup manusia dan pembangunan semakin baik. Pada tahun 2020 dengan target 67,53 realisasi 66,54 dan capaian kinerja 98,53% sedangkan untuk tahun 2021 dengan target 68,08 realisasi 66,63 capaian Kinerja 97,87. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021, ada kenaikan pada IPM Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2020 yakni sebesar 0,09 poin.

Upaya tindaklanjut pemerintah kabupaten indragiri hilir terhadap peningkatan capaian realisasi IPM adalah :

1. Penerapan protokol Covid, memperketat mobilitas masyarakat dan Sosialisasi hidup sehat dimasa pandemi dan menekan jumlah kematian pasien yang terpapar Covid 19.
2. Memperbaiki perekonomian masyarakat yang pendapatannya menurun pada masa pandemi Covid 19.
3. Mempercepat pemberian vaksin bagi seluruh masyarakat di kabupaten Indragiri Hilir.



4. Mengoptimalkan dimensi pendapatan, kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat kabupaten Indragiri Hilir.
5. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap berbagai sumber hambatan dalam meningkatkan layanan perangkat daerah pada masyarakat kabupaten indragiri Hilir

### Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Indikator RLS ini dihitung dari variable pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 10 tahun.

**Tabel 3.31**  
**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Rata-rata Lama Sekolah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian (%)	Tahun 2021		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,26	7,23	99,57%	7,38	7,24	98,10%

RLS akan menjadi salah satu komponen pembentuk Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menempuh berbagai upaya dengan meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan. Salah satu cara paling efektif untuk menaikkan waktu rata-rata lama sekolah bukan dengan menyekolahkan kembali penduduk Indonesia khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir yang telah berusia lanjut, tetapi mengupayakan agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah.

RLS dapat juga digunakan untuk melihat kualitas penduduk di wilayah tertentu dari sisi rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya. Kemudian dapat juga digunakan untuk perencanaan dan evaluasi capaian program wajib belajar.



RLS menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2020 dengan target capaian kinerja 7,26 tahun, terealisasi 7,23 tahun dengan capaian 99,57%. Pada tahun 2021 dengan target 7,38 tahun, terealisasi 7,24 dengan capaian 98,10%. Bila dibandingkan realisasi tahun 2020, pada tahun 2021 realisasinya meningkat 0,01%. Bila dilihat dari capaiannya pada tahun 2021 menurun dari capaian 98,10% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar 99,57%, ini disebabkan karena target tahun 2021 lebih tinggi dari tahun 2020. Rata-rata lama sekolah tahun 2021 cenderung meningkat, sehingga dapat disimpulkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir semakin baik. Dengan kata lain penduduk mampu menempuh pendidikan sampai kelas 3 SMP atau putus sekolah di kelas 3 SMP. Adapun faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target antara lain dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi, meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, Pendidikan Non Formal (Pendidikan Kesetaraan), dan Pemberian Beasiswa bagi pelajar yang berprestasi dan pelajar yang kurang mampu. Disamping faktor dari dalam ada juga faktor dari luar sektor Pendidikan antara lain faktor Demografi, Sosial Budaya dan Ekonomi. Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target adalah keterbatasan pada anggaran, kemauan dan keinginan masyarakat yang kurang untuk melanjutkan sekolah atau kembali bersekolah pada usia yang produktif (15-55 tahun).

Untuk mencapai target Rata-Rata Lama Sekolah masih membutuhkan upaya yang lebih keras lagi dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Keberhasilan peningkatan pencapaian target kinerja RLS dari tahun sebelumnya didukung dengan adanya komitmen pemerintah daerah dan anggaran bidang pendidikan yang memadai.

### **Harapan Lama Sekolah**

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.



**Tabel 3.32**  
**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian (%)	Tahun 2021		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,76	11,91	93,33%	12,96	11,93	92,05%

Adapun target Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2020 adalah 12,76 tahun, dan terealisasi 11,91 tahun dengan capaian 93,33%. Pada tahun 2021 dengan target 12.96 tahun, terealisasi 11.93 tahun dengan capaian 92.05%, artinya realisasi ditahun 2021 meningkat bila dibandingkan tahun 2020. Untuk capaiannya pada tahun 2021 menurun bila dibandingkan tahun 2020, disebabkan target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan pada tahun 2021 lebih tinggi dari tahun 2020.

Dilihat dari tahun 2020, realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan 0,02%. artinya bahwa diharapkan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir pendidikannya setingkat SLTA. Diasumsikan juga bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Namun demikian capaian kinerja dapat dikategorikan sangat baik karena hampir mencapai target yang ditetapkan dengan berbagai upaya akan terus dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebagai instansi pemerintah yang berwenang dalam urusan pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir.

### Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup yaitu rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Sementara peningkatan angka harapan hidup menunjukkan bahwa bayi-bayi telah terjamin kesehatan dan kemiskinan sudah diatasi lebih baik.



Berdasarkan serangkaian *Age Specific Rate* atau rata-rata spesifik dari kematian, besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu, dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi mencapai umur tertentu.

Harapan hidup berbeda dengan lama hidup, lama hidup atau panjang hidup yakni jumlah tahun maksimum penduduk untuk hidup. Berbeda dengan harapan hidup, lama hidup antara penduduk suatu negara atau daerah dengan daerah lainnya tidak berbeda karena umur manusia ada batas maksimumnya.

“Usia harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi”. Jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Oleh karenanya, biasanya dinegara-negara maju harapan hidupnya tinggi karena pada umumnya tingkat kesehatan ibu dan bayinya tinggi. Sebaliknya di negara berkembang biasanya relatif rendah disebabkan karena buruknya tingkat kesehatan. “Cara untuk menentukan usia harapan hidup ialah dengan menunjukkan dan meratakan semua umur dari seluruh kematian pada waktu tertentu”. Contohnya jika disuatu daerah diketahui bahwa terdapat 50 orang yang meninggal umur masing-masing yang meninggal berbeda-beda ada yang 2 tahun ada yang 40 tahun, bahkan ada yang 95 tahun.

Umur masing-masing yang meninggal dijumlahkan semuanya dan kemudian dibagi dengan jumlah orang yang meninggal pada tahun itu, yakni sebanyak 50 orang. Misalnya ketika dijumlahkan semua orang yang meninggal diperoleh sebesar 2.500 maka usia harapan hidup dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Usia harapan hidup} = \frac{2.500}{50} = 50 \text{ tahun}$$

**Tabel 3.33**  
**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian (%)	Tahun 2021		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,00	67,85	99,78%	68,40	67,98	99,39%

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 mencapai 99,39% dari target 68,40 tahun dapat terealisasi 67,98 tahun. Pada tahun 2020 dari target Usia Harapan Hidup 68,00 Tahun dengan realisasi sebesar 67,85 tahun dengan capaian 99,78%. Dapat diartikan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2020 dengan Realisasi 67,98 tahun berbanding 67,85 tahun.





Target dan realisasi capaian indikator Angka Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 belum mencapai target dengan selisih nilai 0,42. Hal ini dikarenakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi belum maksimal di beberapa tempat.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, melalui Dinas Kesehatan mengharapkan dan memaksimalkan semua peran tugas dan fungsi di setiap akses pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai target yang diharapkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai program dan kegiatan yang mendukung indikator Angka Harapan Hidup diantaranya:

- Pelayanan kesehatan ibu hamil
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Meskipun secara umum Angka Harapan Hidup masih rendah namun indikator ini sangat dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya yaitu Angka Kecukupan Gizi, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, angka kesakitan dan angka penemuan penyakit menular, yang kinerjanya perlu terus ditingkatkan.

Adapun hambatan dalam pencapaian target antara lain masih adanya budaya masyarakat yang menganggap kesakitan ataupun kematian merupakan takdir, terbatasnya jumlah SDM yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan primer, akses jangkauan dan disparitas, keterbatasan pemenuhan SARPRAS dan ALKES untuk mendukung pelaksanaan pelayanan. Disamping itu, faktor lainnya yang bersifat teknis seperti :

- a. Tingginya kasus wabah Penyakit Menular (Covid-19) di Masyarakat
- b. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi
- c. Rendahnya persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
- d. Status gizi masyarakat yang masih rendah.
- e. Meningkatnya penyakit tidak menular.
- f. Akses Pelayanan Kesehatan yang belum optimal
- g. Pemahaman dan Kesadaran masyarakat tentang PHBS rendah.
- h. Akses sanitasi jamban masih sangat rendah
- i. Pemenuhan kebutuhan obat, fasilitas kesehatan dan alkes yang belum memadai
- j. Fasilitas Kesehatan ( Sarana dan Prasarana ) Belum cukup dan belum merata
- k. Manajemen Puskesmas yang di Akreditasi dan Penataan Informasi Kesehatan
- l. Belum Tercukupi SDM Kesehatan

Dalam meningkatkan Usia / Angka Harapan Hidup ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu Kualitas Lingkungan, Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pola Hidup, dan Gaya Hidup. Peningkatan Usia / Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten tidak terlepas dari komitmen Kepala Daerah untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten



Indragiri Hilir yang mempunyai visi “ Masyarakat Sehat Desa Maju Inhil Gemilang” dan RSUD yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan 9 Misi dengan tujuan Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara adil merata di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :

1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau;
2. Meningkatkan upaya promotif dan preventif;
3. Meningkatkan status gizi masyarakat;
4. Meningkatkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
5. Mengupayakan ketersediaan sumberdaya kesehatan (SDK) yang merata;
6. Meningkatkan peran desa siaga aktif melalui kemitraan dengan masyarakat
7. Melaksanakan penanggulangan masalah kesehatan dan penyehatan lingkungan
8. Melaksanakan pengawasan dan pengaturan di Bidang kesehatan
9. Menyelenggarakan manajemen dan informasi kesehatan

Tujuan ke-5

#### **4) Meningkatkan Efektivitas Program DMIJ Plus Terintegrasi**

Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya pertama kali diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014. Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat desa dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam proses perjalanan DMIJ Tahun 2014-2018 masih terdapat beberapa kekurangan, maka Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkomitmen menyempurnakan program sebelumnya menjadi Program DMIJ Plus Terintegrasi.

Program DMIJ Plus Terintegrasi merupakan wujud nyata Bapak H.Muhammad Wardan dan Bapak Syamsuddin Uti periode 2018-2023 membangun Indragiri Hilir. DMIJ Plus Terintegrasi bukan hanya memfasilitasi proses pembangunan dan pemberdayaan di tingkat desa namun juga pembangunan dan pemberdayaan di tingkat Kelurahan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperlukan penguatan secara sistematis kelembagaan yang ada untuk menjalankan kebijakan pemerintah pusat dan daerah di tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan. Pada tahun 2020, dengan beberapa perubahan dan penyesuaian dengan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, maka pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menerbitkan Petunjuk Teknis Operasional Program DMIJ Plus Terintegrasi dan diharapkan dengan adanya petunjuk teknis operasional ini dapat menjawab kebutuhan perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

Disamping itu, program DMIJ Plus Terintegrasi bertujuan sebagai penggerak agar pembangunan/kegiatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai khas daerah



tersendiri, artinya mengikuti khasanah Indragiri Hilir. Program ini dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui pola pendampingan.

Tujuan ke-5 pada capaian kinerja Kabupaten Indragiri Hilir adalah Meningkatkan Efektivitas Program DMIJ Plus Terintegrasi dengan 1 (satu) sasaran strategis, yaitu : Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Tujuan ke-5, diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu Persentase desa berstatus Maju dalam IDM terhadap total desa, Partisipasi Lembaga Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat, dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

**Tabel 3.34**  
**Capaian Kinerja Meningkatkan Efektivitas Program DMIJ Plus Terintegrasi**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian (%)	Tahun 2021		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase desa berstatus Maju dalam IDM terhadap total desa	Persentase	10,15	10,65	104,93%	15,23	16,24	106,63%
2	Partispasi Lembaga Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase	53,50	53,50	100%	54,65	55,00	100,64%
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	65,72	64,45	98,07%	66,62	N/A	N/A
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>101%</b>			<b>103,64%</b>

*Sumber data : Bagian Organisasi (diolah)*

Berdasarkan data capaian kinerja di atas dapat dilihat, Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 adalah 101% dan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 103,64%. Artinya rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,64%. Terdapat 1 (satu) indikator dari Tujuan Meningkatkan Efektivitas Program DMIJ Plus Terintegrasi yang belum diperoleh realisasinya, hal ini dikarenakan masih menunggu data rilis BPS. Rincian analisis capaian setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut ini :

#### **Persentase Desa berstatus Maju dalam IDM terhadap total Desa**

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dapat dilihat bahwa Persentase Desa berstatus Maju dalam IDM terhadap total desa sebagai tolok ukur capaian kinerja Meningkatkan efektivitas Program DMIJ Plus Terintegrasi pada tahun 2020 dengan target 10,15 terealisasi



sebesar 10,65 dengan capaian kinerja 104,93%. Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, pada tahun 2020 Indeks Desa Membangun untuk wilayah Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan. Saat ini jumlah desa maju yang ada berdasarkan IDM berjumlah 21 desa maju. Sedangkan Persentase Desa berstatus Maju dalam IDM terhadap total desa sebagai tolak ukur capaian kinerja Meningkatkan efektivitas Program DMIJ Plus Terintegrasi pada tahun 2021 dengan target 15,23 terealisasi sebesar 16,24 dengan capaian kinerja 106,63%. Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, pada tahun 2021 Indeks Desa Membangun untuk wilayah Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan. Saat ini jumlah desa maju yang ada berdasarkan IDM berjumlah 32 desa maju. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa adanya penambahan 11 (sebelas) desa yang berstatus maju dari tahun 2020 yang lalu. Tercapainya target indikator kinerja ini tidak terlepas dari peran penting seluruh lapisan masyarakat desa itu sendiri dan disebabkan terealisasinya kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja di atas. Selain itu pencapaian target diatas juga karna didukung oleh sumber daya manusia dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, sumber daya manusia yang dimaksud adalah Pendamping Desa dengan jumlah pendamping desa sebanyak 202 orang.

### **Partisipasi Lembaga Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat**

Partisipasi merupakan hal yang erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dinilai berhasil atau tidaknya terlihat dari bagaimana partisipasi masyarakatnya dalam prosesnya. Dengan melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat, nantinya akan diketahui bagaimana kondisi masyarakat tersebut dan seperti apa pola pikir masyarakat. Ketika sikap partisipasi di masyarakat sudah terbangun maka terlihatlah perkembangan pemikiran masyarakat akan sadarnya dengan kondisi mereka. Partisipasi adalah suatu kondisi dimana masyarakat ikut serta dalam proses pengidentifikasian masalah dan bagaimana cara menanganinya, keputusan atau tindakan apa yang harus diambil untuk menghadapi masalah tersebut.

Untuk kita ketahui bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir ini terdapat 197 Desa dengan berbagai jenis lembaga masyarakat bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan. Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dapat dilihat bahwa Persentase Partisipasi Kelembagaan Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2020 telah dilakukan pembinaan lembaga oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Indragiri Hilir dengan target 53,50% terealisasi sebesar 53,50% dengan capaian kinerja 100%. Sedangkan pada tahun 2021 juga dilakukan pembinaan terhadap lembaga yang ada pada 197 desa di Kabupaten Indragiri Hilir dengan target 54,65% dengan realisasinya sebesar 55,00%.



Dengan demikian pada tahun 2021 terjadi peningkatan realisasinya dari target yang telah ditetapkan. Tercapainya target indikator kinerja ini tidak terlepas dari peran penting seluruh lapisan masyarakat desa itu sendiri dan disebabkan terealisasinya kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja di atas. Selain itu pencapaian target diatas juga karna didukung oleh sumber daya manusia dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, sumber daa manusia yang dimaksud adalah Pendamping Desa dengan jumlah pendamping desa sebanyak 202 orang.

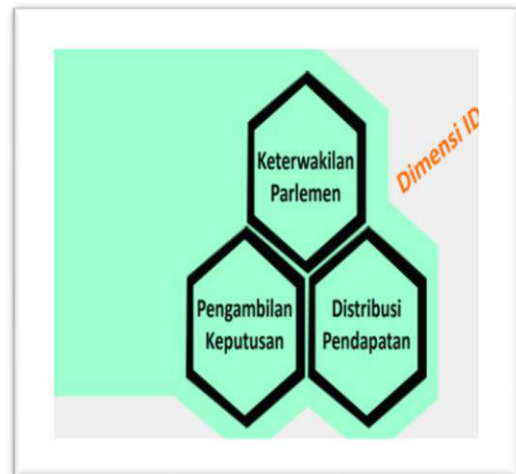
### Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Secara umum pencapaian pemberdayaan gender di Kabupaten Indragiri Hilir telah menunjukkan kesungguhan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. IDG Kabupaten

Indragiri Hilir tahun 2020 dengamn target 65,72 dengan realisasi 64,45 dengan realisasi capaian kinerja 98,07%. Adapun untuk tahun 2021 ini dengan target 66,62 untuk realisasinya belum bisa ditampilkan dikarenakan belum dirilisnya data oleh BPS Kabupaten Indragiri Hilir. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan ukuran keserataan antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender bidang ekonomi. IDG menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi.

IDG terdiri tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indikator persentase upah buruh non pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan.





Tujuan ke-6

**5) Mewujudkan Kerukunan,Keamanan,Ketertiban, dan Ketentraman Sosial**

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran Hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan.

Berdasarkan pengertian diatas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

Tujuan ke-6 pada capaian kinerja Kabupaten Indragiri Hilir adalah Mewujudkan Kerukunan, Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Sosial dengan 1 (satu) sasaran strategis, yaitu : Terwujudnya Stabilitas Trantibunlinmas yang kondusif. Tujuan ke-6, diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial, Angka Pelanggaran Trantibmas, Angka Konflik dan Persentase Resiko Bencana pada KRB.

**Tabel 3.35**  
**Capaian Kinerja Mewujudkan Kerukunan, Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Sosial**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian (%)	Tahun 2021		Capaian (%)
			Tar get	Reali sasi		Tar get	Realis asi	
1	Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas Sosial	Persentase	93	60,23	64,76%	93 %	93%	100%
2	Angka Pelanggaran Trantibmas	Persentase	864	394	45%	720	1208	70,04%
3	Angka Konflik	Indeks	2	2	100%	1	1	100%
4	Persentase resiko bencana pada KRB	Persentase	1,32	1,54	85,71%	1,25	3,1	40,32%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>73,86%</b>			<b>77,59%</b>

Sumber data : Bagian Organisasi (diolah)



Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas dapat dilihat pada tahun 2020, rata rata capaian kinerja sebesar 60,23% dan pada tahun 2021 sebesar 77,59 %, artinya pada Tahun 2021, capaian kinerja mengalami peningkatan sebesar 17,36%. Rincian analisis capaian setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut ini :

### **Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial**

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir:

***“Terwujudnya Situasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif di Kabupaten Indragiri Hilir Menuju Kabupaten yang Maju, Bermartabat dan Bermartabat”***

Visi tersebut dicapai melalui pelaksanaan Misi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, diantaranya:

1. Menegakan Perda dan Perkada Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Melaksanakan Perlindungan Masyarakat

Penetapan tujuan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir juga diselaraskan dengan Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023 yakni ***“Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial”*** dengan rumusan sebagai berikut:

- Mewujudkan masyarakat, aparatur dan badan hukum di Kabupaten Indragiri Hilir yang patuh dan taat pada Perda/Kebijakan Kepala Daerah.
- Menciptakan rasa tentram dan kondisi yang tertib di dalam masyarakat.
- Pembentukan dan Pembinaan satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas).

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran Hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan.



**Tabel 3.36**  
**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas Sosial**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian (%)	Tahun 2021		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas Sosial	Persentase	93%	60,23%	64,76%	93%	93%	100%

Sumber: LKJIP Satpol PP Tahun 2021

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dapat dilihat bahwa Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas Sosial sebagai tolok ukur capaian kinerja Mewujudkan Kerukunan, Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Sosial pada tahun 2021 dengan target 93% terealisasi sebesar 93% dengan capaian kinerja 100%, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 dengan target 93% terealisasi 60,23% dengan capaian 64,76%.

Pada tahun 2021 capaian kinerja mencapai 100%, berarti telah sesuai target yang direncanakan. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa factor diantaranya:

- Patroli wilayah secara rutin dan sosialisasi perda oleh Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan mampu memberi pemahaman akan peraturan daerah
- Antusias personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas walaupun jumlah PPNS masih kurang sesuai aturan yang ada
- Komitmen pejabat dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

### Angka Pelanggaran Trantibmas

Kota adalah suatu pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, terdiri dari kelompok individu yang heterogen dari segi sosial. Kota merupakan tempat bergabungnya berbagai hal dan merupakan kumpulan keanekaragaman banyak hal. Lapisan masyarakat di dalam perkotaan sangat beragam, begitu juga dengan bangunannya. Oleh sebab itu, kota dapat dikatakan sebagai suatu wilayah yang dimana bangunan dan lapisan masyarakatnya sudah menjadi satu kesatuan. Dalam perkembangannya, segala aspek akan ikut tumbuh dan berkembang serta memunculkan permasalahan yang kompleks pula. Perkembangan dan perubahan suatu kota terjadi pada kondisi fisik, ekonomi, sosial dan politik. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan seharusnya mempertahankan atau memelihara sesuatu yang baik tentang kota dan berupaya merencanakan pertumbuhan dan perubahannya.





Sebagai wujud dari pengaturan terhadap daerah, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia berupaya melakukan pengaturan terhadap kegiatan-kegiatan yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat atau ketertiban umum. Bentuk konkret pengaturan tersebut adalah dengan membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban umum.

Semakin berkembang dan majunya Kabupaten/Kota, maka semakin tinggi angka pelanggaran dan kriminalitas. Tingginya pelanggaran dan kriminalitas sangat berpengaruh pada ketentraman dan ketertiban umum yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat sangat mutlak diperlukan, supaya kehidupan bermasyarakat semakin aman, damai dan manjalkan aktivitasnya tanpa ada rasa takut dan was-was.

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja selaku Perangkat Daerah penanggung jawab merumuskan tindakan sebagai berikut :

1. Penindakan terhadap setiap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Patroli siaga dan operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Terbentuknya petugas Satlinmas yang terlatih.

**Tabel 3.37**  
**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Angka Pelanggaran Trantibmas**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian (%)	Tahun 2021		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Angka Pelanggaran Trantibmas	Persen tase	864	394	219,3%	720	1208	70,04%

Sumber: LKJIP Satpol PP Tahun 2021

Pada tahun 2021 realisasi pelanggaran Trantibmas sebanyak 1.208 kasus, dengan capaian 70,04% lebih banyak dibandingkan dari tahun 2020 sebanyak 394 kasus, dengan capaian 219,3%. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat akan Perda menurun, kedepan seiring berkembangnya pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir akan muncul permasalahan-permasalahan baru yang menjadi tantangan Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada.

Adapun jenis pelanggaran pada trantibmas diantaranya, pelanggaran patroli pedagang kaki lima (PKL) dan plang toko dengan jumlah kasus 958 kasus dengan tindakan memberikan teguran SP. I,II,III dan pelanggaran patroli Unit Reaksi Cepat (URC) dengan jumlah kasus 250 kasus dengan tindakan memberikan teguran dan sanksi disiplin. Adapun jenis kasus yang telah ditangani oleh tim URC Satpol PP diantaranya mulai dari minuman keras, ngelem, laporan ODGJ, remaja yang kebut-kebutan dan laporan lainnya. Di masa pandemi ini URC juga memberikan



sosialisasi dan edukasi kepada setiap masyarakat untuk tetap memakai masker, menjaga jarak serta jangan lupa ikut vaksinasi.

Kondisi perubahan wilayah yang selalu berkembang kearah peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, berbanding lurus dengan peningkatan beban dan tantangan tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Semakin tinggi tingkat perkembangan suatu wilayah, maka semakin tinggi juga kemungkinan tidak tertibnya pelaksanaan peraturan di masyarakat.

Perubahan wilayah tersebut sudah selayaknya juga diimbangi dengan penyiapan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki kompetensi dari sisi integritas dan profesionalisme. Tanpa kedua hal tersebut maka akan semakin berat tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melaksanakan fungsinya.

Tantangan lain yang seringkali salah persepsi adalah bahwa dengan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka akan semakin sedikit temuan pelanggaran dilapangan. Padahal seharusnya semakin professional dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja maka temuan pelanggaran yang didapatkan juga akan meningkat. Hal ini bukan karena semakin banyaknya pelanggaran terhadap peraturan yang terjadi, melainkan karena semakin cermatnya petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengantisipasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

## Angka Konflik

Konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Berdasarkan Data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2020 dengan target 2 (dua) kasus konflik terealisasi 2 (dua) kasus konflik yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir dengan capaian kinerja sebesar 100%, konflik tersebut terdiri dari Konflik Lahan PT. SAGM dengan masyarakat sekitar Kecamatan Batang Tuaka dan Konflik Rumah Ibadah di Tembilahan. Sedangkan angka konflik di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2021 dengan target 1 kasus konflik terealisasi 1 kasus konflik yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir dengan capaian kinerja sebesar 100%, konflik tersebut terdiri dari Konflik Lahan PT. SAGM dengan masyarakat sekitar Kecamatan Batang Tuaka yang timbul kembali untuk difasilitasi. Pencapaian indikator kinerja ini disebabkan adanya dukungan dari semua pihak agar kasus konflik cepat terselesaikan dan tidak berlarut-larut guna memberikan rasa aman kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.



## Persentase Resiko Bencana pada KRB

Kajian risiko bencana memberikan gambaran umum daerah terkait tingkat risiko suatu bencana pada suatu daerah. Proses kajian harus dilaksanakan untuk seluruh bencana yang ada pada setiap daerah. Proses kajian sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir yang tergabung dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017 - 2021. Sebagai pengkajian yang dilaksanakan setelah masa perencanaan sebelumnya, maka pengkajian memuat dasar perolehan tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko bencana. Khusus penamaan bencana dan lingkup kajian disesuaikan dengan kerangka acuan BNPB yang merupakan lembaga kebencanaan tingkat nasional. Selain berdasarkan kerangka acuan kerja BNPB, pengkajian perlu mengacu kepada pedoman umum pengkajian risiko bencana dan referensi lainnya yang ada di kementerian/lembaga terkait lainnya di tingkat nasional terkait dengan metodologi pengkajian. Berdasarkan metodologi diperoleh hasil pengkajian risiko bencana di Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil tersebut memuat tingkat risiko bencana yang dimulai dari hasil tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas.

Dapat di lihat capaian Kinerja Persentase Resiko Bencana pada KRB (Km<sup>2</sup>) Tahun 2020 dengan target 1,32 Km<sup>2</sup> dan terealisasi 1,54 Km<sup>2</sup> dengan capaian kinerja sebesar 85,71%. Dengan luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir seluas 12.615 Km<sup>2</sup> yang terletak dipantai Timur Pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 Km<sup>2</sup> dan perairan 7.207 Km<sup>2</sup>.

Pada tahun 2020 BPBD mencatat laporan kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir secara garis besarnya bencana yang sering dialami oleh Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Karhutla, dimana kejadian Karhutla di kabupaten Indragiri Hilir terjadi sebanyak 52 Kejadian di beberapa titik rawan bencana yang ada diwilayah Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas lahan yang terbakar Tahun 2020 mencapai ±184,35 Ha. Jauh Menurun di dibandingkan ditahun 2019 Mencapai ± 3.173,75 Hektar, Laporan Rekapitulasi kejadian Bencana yang disusun oleh TIM PUSDATIN BPBD Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan kejadian bencana yang terjadi sepanjang tahun 2020.

Sedangkan pada tahun 2021 BPBD mencatat laporan kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir secara garis besarnya bencana yang sering dialami oleh Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Karhutla, dimana kejadian Karhutla di kabupaten Indragiri Hilir terjadi sebanyak 52 Kejadian di beberapa titik rawan bencana yang ada diwilayah Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas lahan yang terbakar tahun 2021 mencapai ± 328,5 Ha. Terjadi peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2020 yang mencapai ± 184,35 Ha, Laporan Rekapitulasi kejadian Bencana yang disusun oleh TIM PUSDATIN BPBD Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan kejadian bencana yang terjadi sepanjang tahun 2021.



Penyebab bencana khususnya kebakaran hutan dan lahan di beberapa tempat di kabupaten Indragiri Hilir disebabkan oleh beberapa factor diantaranya cuaca panas dan pembakaran hutan dan lahan yang menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan. Oleh karena itu Pemerintah sangat melarang pembakaran hutan dan lahan dengan alasan apapun.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran Menurunnya Resiko Bencana antara lain :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat membuka lahan dengan cara membakar
2. Pada pelaksanaan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan sumber air jauh dari lokasi kebakaran
3. Lokasi kebakaran lahan dan hutan sulit dijangkau dengan kendaraan
4. Tenaga Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kurang.

Solusi untuk menurunkan resiko bencana diantaranya melakukan kerjasama dengan masyarakat tanggap menghadapi bencana, terlatih dan siap dalam menghadapi bencana lokasi kebakaran hutan yang sulit dapat dilakukan dengan menggunakan helikopter (Water Boom).

Tujuan ke-7

## 6) Meningkatkan Penanggulangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

Proyeksi gini ratio Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 0,32, lebih rendah dibanding gini ratio yang ditargetkan pada RKP 2021. Agar sasaran gini ratio tahun 2021 dapat tercapai maka kebijakan antara lain yaitu memperbanyak pendidikan vokasi, meningkatkan alokasi anggaran untuk kesejahteraan kaum miskin, dan fokus pada sektor

pertanian dan usaha kecil, Rasio Gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva lorenz (daerah A) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Rasio gini digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Rasio gini Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020 sebesar 0,31, lebih rendah dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,297 (0,30)

Pada tahun 2021, proyeksi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Indragiri Hilir berkisar 4,9–5,2%, sudah dibawah besaran pengangguran terbuka yang ditetapkan RKP 2021. Sasaran indikator makro tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 dapat dicapai antara lain melalui kebijakan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan





keterampilan bagi pencari kerja, memperkuat sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi berbasis sumberdaya lokal, meningkatkan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.

Tujuan ke-7 pada capaian kinerja Kabupaten Indragiri Hilir adalah Meningkatkan Penanggulangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran dengan 1 (satu) sasaran strategis, yaitu : Meningkatnya Pendapatan Penduduk Miskin. Tujuan ke-7, diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Persentase Penduduk Miskin dan Rata-rata Pendapatan Penduduk Miskin.

**Tabel 3.38**  
**Capaian Kinerja Meningkatkan Penanggulangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian (%)	Tahun 2021		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Penduduk Miskin	Persentase	7,40	5,93	80,13 %	7,30	6,18	84,66 %
2	Rata-rata Pendapatan Penduduk Miskin	Perbulan/ Kapita	451. 708	495.3 06	109,65%	485.0 35	518.28 3	106.85 %
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>94,89 %</b>			<b>95,76 %</b>

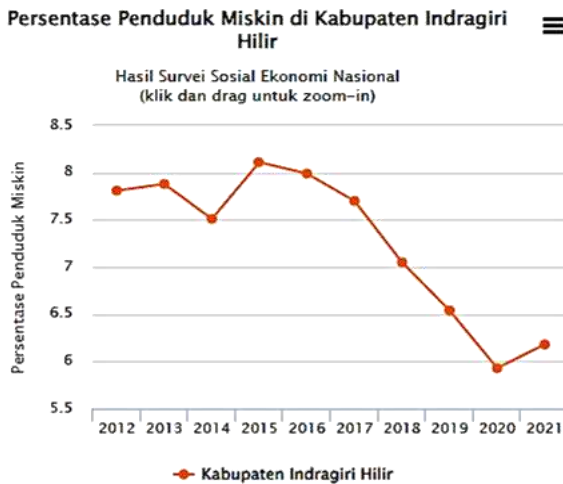
Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas dapat dilihat Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 adalah 94,89% sementara pada tahun 2021 sebesar 95,76%. Artinya pada tahun 2021 capaian kinerja mengalami peningkatan sebesar 0,87%. Rincian analisis capaian setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut ini :

### **Persentase Penduduk Miskin**

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perbulan dibawah garis kemiskinan, Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Tabel dan grafik persentase angka kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan data dari BPS setiap tahun terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin sebesar 5,93% atau sekitar 44,29 ribu penduduk miskin. Pada tahun 2021 dengan target 7,30 terealisasi sebesar 6,18% atau sekitar 44,61 ribu penduduk miskin Kabupaten Indragiri Hilir dengan capaian kinerja sebesar 84,66%. Tingkat



kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 adalah 6,18% mengalami kenaikan 0,25% dari tahun 2020 dengan garis kemiskinan sebesar 518.283 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa Capaian meningkat 2.36%. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin tersebut tidak terlepas dari kebijakan dan program pemerintah baik pusat maupun daerah.



Berdasarkan data dari BPS tentang profil kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021, Penduduk miskin yang dimaksud adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perbulan dibawah garis kemiskinan, atau rata-rata pendapatan penduduk miskin perbulan/kapita di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020 realisasi sebesar Rp.495.306 sedangkan pada tahun 2021 Rp.518.283 atau naik Rp.22.977 dibandingkan tahun sebelumnya.

Defenisi Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk di punyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, halhal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada dibawah garis kemiskinan (poverity line) merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.



Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan dari sisi ekonomi :

- Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang.
- Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia.
- Kemiskinan muncul sebagai akses perbedaan akses dalam modal, dimana aliranmodal lebih banyak berpusat pada daerah perkotaan.

Empat faktor penyebab kemiskinan.

- rendahnya taraf pendidikan;
- rendahnya taraf kesehatan;



3. terbatasnya lapangan kerja; dan
4. kondisi keterisolasian.

Menyatakan suatu keluarga menjadi miskin disebabkan oleh tiga faktor, yaitu :

1. faktor sumber daya manusia;
2. faktor sumber daya alam; dan
3. faktor teknologi.

Sumber daya manusia ditentukan oleh tingkat pendidikan, dependensi ratio, nilai sikap, partisipasi, ketrampilan pekerjaan dan kesemuanya itu tergantung kepada sosial budaya masyarakat itu sendiri. Juga penyebab terjadinya kemiskinan dimana akibat dari berbagai faktor yang terdiri dari : Pertama rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan pengembangan diri yang terbatas. Kedua rendahnya tingkat kesehatan dimana tingkat kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan daya tahan fisik, daya pikir serta prakarsa menjadi pula. ketiga terbatasnya lapangan kerja, selama lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha masih ada, harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan masih dapat di lakukan. Keempat kondisi terisolasi, dalam kondisi terpencil atau terisolasi penduduk akan kurang mampu menjalankan roda perekonomiannya. Kemiskinan merupakan sebuah konsep abstrak yang dapat dijelaskan secara berbeda dimana tergantung dari pengalaman dan perspektif analis. Cara pandang analis akan menentukan pemahaman tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan, bagaimana kemiskinan itu terjadi (sebab-sebab kemiskinan) dan penanggulangan kemiskinan dapat diatasi. Oleh karena itu, agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat di lakukan secara tepat maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menjelaskan pengertian dan penyebab kemiskinan secara lengkap. Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang masuk kedalam kategori miskin, Namun, menurut World Bank setidaknya ada tiga faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu :

1. Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan pasar, seperti : makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan dan pendidikan.
2. Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan di depan institusi negara dan masyarakat.
3. Rentan terhadap guncangan ekonomi, terkait dengan ketidakmampuan menanggulangnya.

### **Rata-rata Pendapatan Penduduk Miskin**

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari Pendapatan perkapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi pendapatan per kapita masyarakat.



Berdasarkan data dari BPS tentang statistik ketenagakerjaan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020, bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka sampai dengan kondisi Agustus 2020 sebesar 4,35% atau turun 0,21% dari tahun sebelumnya. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Indragiri Hilir merupakan yang terendah se-Provinsi Riau. Dimana Tingkat Pengangguran Terbuka Riau sendiri sebesar 6,32%. Selain itu, juga mengalami pertumbuhan *negative* terbesar (-0,21%) se-Provinsi Riau. Adapun untuk Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.980.000,-. Upah Minimum Kabupaten ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 234.000,-.

## Tujuan ke-8

### 7) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Rakyat Berbasis Sektor Unggulan

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah memiliki sumber daya alam dengan karakteristik dan keunikan tersendiri akan kekayaan alamnya. Dengan potensi sumberdaya alam yang berlimpah dan letak geografis yang sangat strategis, Indragiri Hilir terus memacu diri mengembangkan kawasannya menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Riau dan pusat pertumbuhan kebudayaan melayu di Asia Tenggara. Dengan potensi kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir, keindahan alamnya, tanah yang subur untuk pertanian dan peternakan, lautnya yang berlimpah ikan, jika dikelola dengan teknologi dan inovasi, Indragiri Hilir akan bergerak lebih maju lagi. Perekonomian ekonomi Indragiri Hilir mengalami pertumbuhan yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut tentu saja diiringi dengan peningkatan per kapita masyarakat. Namun masih saja terdapat ketimpangan pendapatan di masyarakat sehingga kemakmuran belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Tujuan ke-8 pada capaian kinerja Kabupaten Indragiri Hilir adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Rakyat Berbasis Sektor Unggulan dengan 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatkan Investasi Daerah. Tujuan ke-8, diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Nilai Investasi Daerah.

**Tabel 3.39**  
**Capaian Kinerja Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Rakyat Berbasis Sektor**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian (%)	Tahun 2021		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen tase	4,35	0,34	7,81%	4,49	4,44%	89,87%
2	Nilai Investasi Daerah	Rp. Milyar	265	4.374,6	16,5%	315	1717	543%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>12,15%</b>			<b>316,44%</b>

Sumber data : Bagian Organisasi (diolah)





Berdasarkan data capaian kinerja di atas dapat dilihat Rata-rata capaian Kinerja pada Tahun 2020 sebesar 12,15%, sementara pada tahun 2021 sebesar 316,44%. Artinya peningkatan capaian kinerja pada tahun 2021 mengalami peningkatan luar biasa signifikan diatas 100 persen dengan jumlah sebesar 304,29. Rincian analisis capaian setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut ini :

### Laju Pertumbuhan Ekonomi

Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Ekonomi dikatakan tumbuh jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya dan menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menjadi sasaran utama pembangunan karena tanpa kondisi ekonomi yang baik tujuan pembangunan lainnya sulit untuk diwujudkan.

**Tabel 3.40**  
**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian (%)	Tahun 2021		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,35	0,34	7,81%	4,49	4,44%	89,87%

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 adalah sebesar 4,44 persen dengan target 4,94 persen. Dengan capaian 89,87 persen. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan signifikan sebesar 82,06%, hal ini dikarenakan pada tahun 2020, hampir seluruh kategori lapangan usaha di kabupaten Indragiri Hilir mengalami perlambatan efek dari Pandemi Covid-19, sementara untuk tahun 2021, terjadi pemulihan ekonomi setelah penanganan Pandemi Covid-19.

### Nilai Investasi Daerah

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, maka setiap pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur pemerintahannya terutama dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah adanya peningkatan nilai investasi. Investasi menjadi kunci dalam upaya penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan. Investasi menjadi semacam *window of*



*opportunity* bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pengelolaan potensi ekonomi melalui pengembangan industri berbasis sumber daya lokal dan kerja sama mutualistik antara investor dengan pengusaha lokal.

Demikian pula, investasi diharapkan menjadi medium transfer pengetahuan, manajerial, dan teknologi yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas daerah. Untuk itu, pemerintah daerah dalam hal ini sejatinya memiliki peran yang strategis dalam upaya menarik investasi. Tahun 2021 menjadi masa yang penting bagi pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Indragiri Hilir untuk dapat melaksanakan transformasi ekonomi menuju pertumbuhan berkelanjutan melalui peningkatan investasi.



**Tabel 3.41**  
**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Investasi Daerah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian (%)	Tahun 2021		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai Investasi Daerah	Rp. Milyar	265	4.374,6	1.650,8%	315	1717	543%

Sumber: LKJIP DPMPTSP Tahun 2021

Berdasarkan Rilis Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir, Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menargetkan realisasi investasi sebesar 315.000.000.000 (Tiga Ratus Lima Belas Milyar Rupiah) dan terealisasi sebesar 1.711.728.840.000 (Satu Triliun Tujuh Ratus Sebelas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Dengan kata lain capaian sasaran strategis ini melebihi target yang telah ditetapkan (543%). Penyebab terjadinya peningkatan atas capaian kinerja tersebut, sebagai berikut :

1. Peningkatan kegiatan pengendalian dan pengawasan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021.
2. Terjadi perubahan target kinerja yang dilakukan pada kesempatan Revisi Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023
3. Pelaku usaha masih banyak yang belum memahami cara pelaporan pelaksanaan penanaman modal sehingga nilai investasi terakumulasi pada tahun berkenaan.

Alternatif atau solusi yang dapat direkomendasikan :



1. Penetapan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja setiap tahunnya sekiranya dapat disesuaikan kembali sejalan dengan adanya penetapan APBD Perubahan tahun berkenaan
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat mengalokasikan anggaran untuk penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.
3. Peningkatan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Menjadi kegiatan prioritas daerah guna meningkatkan nilai investasi daerah.

### 3.3 Akuntabilitas Anggaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 2.106.115.996.670,- (Dua triliun seratus enam milyar seratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)**. Berpedoman pada proyeksi indikator ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 diarahkan kepada :

1. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional.
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja.
3. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut, maka kebijakan umum keuangan atau anggaran diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu :

1. Fungsi alokasi, adalah penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta karena bersifat publik service seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur.
2. Fungsi distribusi, adalah penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya.



3. Fungsi stabilisasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diverifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasis pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam **Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah** yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.42**  
**Struktur APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021**

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>
1		3
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.991.718.305.999</b>
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	218.047.130.045
4.2.	Pendapatan Transfer	1.685.605.471.954
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	88.065.704.000
5	<b>BELANJA</b>	<b>2.106.115.996.670</b>
5.1	Belanja Operasi	1.591.756.447.555
5.2	Belanja Modal	226.142.201.271
5.3	Belanja Tidak Terduga	3.176.865.141
5.4	Belanja Transfer	285.040.482.703
6	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>114.397.690.671</b>
6.1	Penerimaan Pebiayaan	114.397.690.671
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>2.106.115.996.670</b>

Sumber : BKAD INHIL Tahun 2022

Kinerja sasaran yang dicapai pada tahun 2021 didukung oleh pelaksanaan program /kegiatan baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program / kegiatan untuk masing-masing sasaran dapat berjalan dengan baik. Dukungan anggaran belanja langsung maupun tidak langsung pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi		Bagian Organisasi Setda Kab. Inhil	Program Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	40.999.950	35.374.547	86,28
				Jumlah / Rata-rata		40.999.950	35.374.547	86,28
2.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Nilai AKIP		Bagian Organisasi Setda Kab. Inhil	Program Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	160.255.900	128.627.325	80,26
		Nilai LPPD		Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Inhil	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	135.000.000	128.525.000	95,20
		Opini BPK atas LKPD		BKAD Kab. Inhil	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	385.294.100	371.920.600	96,53
		Jumlah / Rata-rata		680.550.000	629.072.925	92,44		



3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Keterbukaan informasi		DISKOMINFOPERSANTIK Kab. Inhil	Program Informasi dan Komunikasi Publik	8.689.271.000	8.591.237.342	98,87
					Program Aplikasi Informatika	571.891.500	493.886.600	86,36
					Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	103.388.950	88.992.950	86,08
			Jumlah / Rata-rata		9.364.551.450	9.174.116.892	97,97	
		Rata-rata Capaian Pelayanan Publik		Bagian Organisasi Setda Kab. Inhil	Program Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	105.734.000	80.860.000	76,47
			Jumlah / Rata-rata		105.734.000	80.860.000	76,47	



4.	Memantapkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Rata-rata persentase capaian pelayanan infrastruktur wilayah		DINAS PUTR Kab. Inhil	Program penyelenggaraan jalan	33.283.440.018	20.880.389.388	62,74
				Jumlah / Rata-rata				
5.	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antara wilayah	Persentase panjang jalan kabupaten dan kondisi baik		DINAS PUTR Kab. Inhil	Program Penyelenggaraan Jalan	25.966.412.369	17.263.979.595	66,49
		Persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik		DINAS PUTR Kab. Inhil	Program Penyelenggaraan Jalan	5.119.286.049	2.046.790.918	39,98
		Persentase peningkatan mobilitas barang dan orang		DINAS PERHUBUNGAN Kab. Inhil	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.546.169.100	1.461.555.946	94,53
		Jumlah / Rata-rata					32.631.867.518	20.772.326.459
6.	Mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya alam yang lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		DINAS PERKEBUNAN	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	9.248.585.568	7.606.961.630	82,25%
					Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	826.207.400	789.854.274	95,60%
					Program Perizinan Usaha Pertanian	197.940.000	197.940.000	100%



					Program Penyuluhan Pertanian	1.547.172.000	1.504.624.770	97,25%
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.182.368.000	1.035.392.600	87,57
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.228.200.500	2.028.505.831	91,04
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.687.205.000,00	981.127.951,44	58,15
					Program Penyuluhan Pertanian	377.802.000	335.966.500	88,93
					Jumlah / Rata-rata	17.295.480.468	14.480.373.557	83,72
7.	Meningkatkan kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan, Perdagangan, Industri dan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	Indeks Inovasi Daerah		BAPPEDA Kab. Inhil	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	451.803.750	353.235.526	78,18





				Jumlah / Rata-rata		451.803.750	353.235.526	78,18
8.	Meningkatkan mutu lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam	Indeks Lingkungan Hidup		DLHK Kab. Inhil	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	169.940.000	162.447.158	95,59
					Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	45.710.000	32.325.000	70,72
					Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	1.112.234.000	842.389.244	75,74
					Program Peningkatan Pengendalian Polusi	21.466.250	19.846.250	92,45
				Jumlah / Rata-rata	1.349.350.250	1.057.007.652	78,33	
9.	Mewujudkan SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Dinas Pendidikan Kab. Inhil	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)	10.170.822.225	9.252.181.857	90,97
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	93.666.164.667	83.319.382.024	88,95



					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	45.220.582.950	38.905.358.397	86,03
				Jumlah / Rata-rata		149.057.569.842	131.476.922.278	88,21
				Dinas Kesetanan Kab. Inhil	Pelayanan kesehatan ibu hamil	1.119.736.900	946.191.900	84,50
					Pelayanan kesehatan ibu bersalin	5.391.281.000	5.232.055.000	97,05
					Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	518.245.950	405.657.050	78,28
				Jumlah / Rata-rata		7.029.263.850	6.583.903.950	93,66
10.	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing, beriman dan bertaqwa	Rata-rata lama sekolah (tahun)		Dinas Pendidikan Kab. Inhil	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)	10.170.822.225	9.252.181.857	93,66
		Harapan Lama Sekolah		Dinas Pendidikan Kab. Inhil	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	93.666.164.677	83.319.382.024	93,66
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	45.220.582.950	38.905.358.397	93,66
				Jumlah / Rata-rata		149.057.569.859	131.476.922.286	88,21



11.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup		Dinas Kesetanan Kab. Inhil	Pelayanan kesehatan ibu hamil	1.119.736.900	946.191.900	84,50
					Pelayanan kesehatan ibu bersalin	5.391.281.000	5.232.055.000	97,05
					Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	518.245.950	405.657.050	78,28
				Jumlah / Rata-rata		7.029.263.850	6.583.903.950	93,66
12.	Meningkatkan efektifitas Program DMIJ Plus Terintegritas	Persentase desa berstatus maju dalam IDM terhadap total desa		DMPD Kab. Inhil	Program Penataan Desa	74.600.300	70.333.163	94,28
					Program Peningkatan Kerjasama Desa	2.496.530.750	2.379.193.805	95,30
				Jumlah / Rata-rata		2.571.131.050	2.449.526.968	95,27
13.	Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun desa	Partisipasi lembaga masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat		DMPD Kab. Inhil	Program Administrasi Pemerintahan Desa	16.536.093.821	14.569.952.266	88,11
					Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	880.711.250	672.334.968	76,34
				Jumlah / Rata-rata		17.416.805.071	15.242.287.234	87,51



		Indeks Pemberdayaan Gender		DP2KBP3A Kab. Inhil	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	66.108.500	56.178.100	84,98
					Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	37.550.000	32.577.800	86,76
					Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	276.920.000	222.648.050	80,40
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	42.552.000	40.592.000	95,39
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	35.818.500	32.338.500	90,28
				Jumlah / Rata-rata		458.949.000	384.334.450	83,74
14.	Mewujudkan kerukunan, keamanan ketertiban dan ketentraman sosial terwujudnya stabilitas	Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial		SATPOL PP	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.192.277.200	3.121.295.700	97,78



	trantibumlinmas yang kondusif			Jumlah / Rata-rata	3.192.277.200	3.121.295.700	97,78
15.	Terwujudnya stabilitas trantibumlinmas yang kondusif	Angka Pelanggaran Trantibmas		SATPOL PP			
				Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.743.697.200	2.674.755.700	97,78
				Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.410.186.200	2.365.876.200	97,78
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	80.134.000	61.284.500	97,78



					Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	251.385.000	247.595.000	97,78
					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	448.580.000	446.540.000	97,78
					Penangan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	448.580.000	446.540.000	97,78
				Jumlah / Rata-rata		6.382.562.400	6.242.591.400	97,81
16.	Mewujudkan Kerukunan, Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Sosial	Angka Konflik		Badan KESBANGPOL Kab. Inhil	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas	370.167.000	332.195.500	89,74



					Penanganan Konflik Sosial			
				Jumlah / Rata-rata		370.167.000	332.195.500	89,74
		Persentase resiko bencana pada KRB		BPBD Kab. Inhil	Program Penanggulangan Bencana	2.722.572.000	2.677.676.700	98,35
				Jumlah / Rata-rata		2.722.572.000	2.677.676.700	98,35
17.	Meningkatkan penanggulangan tingkat kemiskinan dan Pengangguran	Persentase Penduduk Miskin		Dinas Sosial Kab. Inhil	Program Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	2.316.268.750	2.037.537.422	87,97
				Jumlah / Rata-rata		2.316.268.750	2.037.537.422	87,97
18.	Meningkatnya pendapatan penduduk miskin	Rata-rata pendapatan penduduk miskin			Program Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.316.268.750	2.037.537.422	87,97
				Jumlah / Rata-rata		2.316.268.750	2.037.537.422	87,97



19.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat berbasis sektor unggulan	Laju pertumbuhan ekonomi		Sekretariat Daerah	Program Perekonomian Pembangunan	900.000.000	835.740.350	92,86
				Jumlah / Rata-rata		900.000.000	835.740.350	92,86
20.	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah		DPMPTSP Kab. Inhil	Program Promosi Penanaman Modal	111.604.850	93.621.200	83,89
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	367.916.300	286.156.650	77,78
				Jumlah / Rata-rata		479.521.150	379.777.850	79,20



---

LKJIP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2021

***BAB IV***

**PENUTUP**





## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021

merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Adapun sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas tujuan maupun sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian pengukuran kinerja terhadap 8 Tujuan, 11 sasaran strategis dengan 28 Indikator Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilannya, diketahui bahwa : Adapun pencapaian kinerja yang tertuang dalam Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023, yaitu :

**Misi 1** : Memantapkan tata kelola pemerintah yang makin responsif, partisipatif, inofatif efektif dan berketepatan hukum.pada Tahun 2021 sebesar **121,25 %** yang diukur berdasarkan Tujuan/sasaran strategis tingkat Rata-rata dari Indikator :

1. Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)
2. Nilai AKIP (Predikat)
3. Nilai LPPD (Nilai)
4. Nilai Keterbukaan Informasi (Nilai)
5. Rata-rata Capaian Indeks Pelayanan Publik (Predikat)

**Misi 2** : Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Tahun 2021 sebesar **76,95 %** yang diukur berdasarkan tujuan/sasaran strategis tingkat Rata-rata dari Indikator

1. Persentase Peningkatan Mobilitas Barang dan Orang
2. Rata-rata Capaian Pelayanan Infrastruktur Wilayah
3. Persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik

**Misi 3** : Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat Tahun 2021 sebesar **100,35 %** yang diukur berdasarkan tujuan/sasaran tingkat Rata-rata :

1. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)
2. Indeks Inovasi Daerah
3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



**Misi 4** : Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing meningkatkan iman dan taqwa. Tahun 2021 sebesar **96,85 %** yang diukur berdasarkan Tujuan/sasaran tingkat Rata-rata dari Indikator:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
3. Harapan Lama Sekolah (Tahun)
4. Angka Harapan Hidup (Tahun)

**Misi 5** : Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan Tahun 2021 sebesar **103,64 %** yang diukur berdasarkan Tujuan/sasaran tingkat Rata-rata dari Indikator :

1. Persentase Desa Berstatus Maju Dalam IDM Terhadap Total Desa
2. Partisipasi Lembaga Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%)
3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

**Misi 6** : Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan social Tahun 2021 sebesar **77,59 %** yang diukur berdasarkan Tujuan/sasaran tingkat Rata-rata dari Indikator:

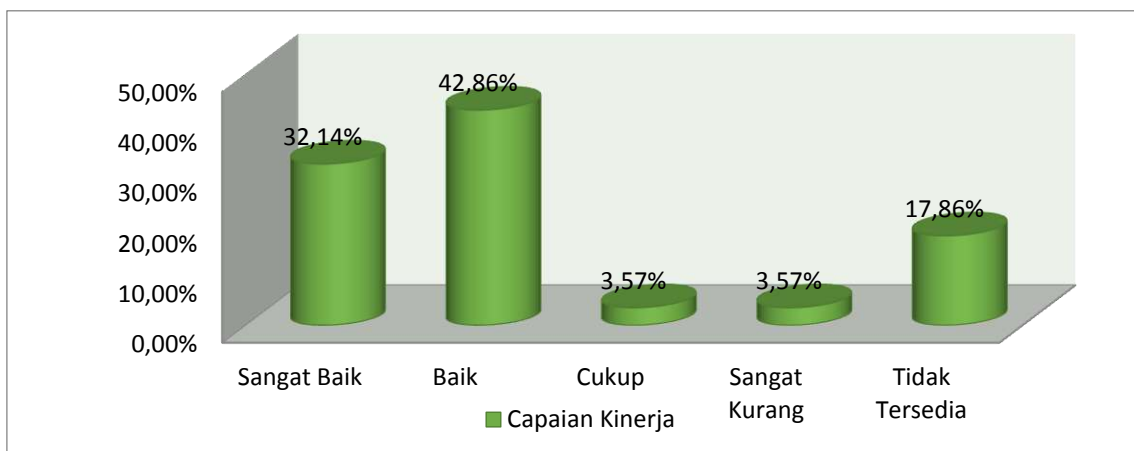
1. Persentasi Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial
2. Angka Pelanggaran Trantibmas
3. Angka Konflik
4. Persentase Resiko Bencana pada KRB

**Misi 7** : Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran Tahun 2021 sebesar **95,76%** yang diukur berdasarkan Tujaan/sasaran tingkat Rata-rata :

1. Persentase Penduduk Miskin (%)
2. Rata-rata Pendapatan Penduduk Miskin (Perbulan\ Kapita)

**Misi 8** : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah Tahun 2021 sebesar **316,44 %** yang diukur berdasarkan Tujuan/sasaran tingkat Rata-rata dari Indikator :

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Nilai Investasi Daerah (Rp.Milyar)





Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 ditetapkan 11 sasaran dengan 28 indikator sasaran, hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

- ❖ Terdapat **8 (Delapan) atau 28.57** Indikator Kinerja kategori **sangat baik**, yaitu :
  - 1) Nilai Keterbukaan Informasi
  - 2) Indeks Inovasi Daerah
  - 3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
  - 4) Partisipasi Lembaga Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
  - 5) Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial
  - 6) Angka Konflik
  - 7) Rata-rata Pendapatan Penduduk Miskin
  - 8) Nilai Investasi Daerah
  
- ❖ Terdapat **11 (Sebelas) atau 39.29%** Indikator Kinerja kategori **baik**, yaitu :
  - 1) Rata-rata Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Wilayah
  - 2) Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik
  - 3) Persentase Peningkatan Mobilitas Barang dan Orang
  - 4) Indeks Pembangunan Manusia
  - 5) Laju Pertumbuhan PDRB
  - 6) Rata-rata Lama Sekolah
  - 7) Harapan Lama Sekolah
  - 8) Angka Harapan Hidup
  - 9) Persentase Desa Berstatus Maju dalam IDM terhadap total Desa
  - 10) Persentase Penduduk Miskin
  - 11) Laju Pertumbuhan Ekonomi
  
- ❖ Terdapat **2 atau 7.14 %** indikator kinerja kategori cukup, yaitu :
  - 1) Persentase Jumlah Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik
  - 2) Angka Pelanggaran Trantibmas
  
- ❖ Terdapat **1 (Satu) atau 3.57 %** indikator kinerja kategori sangat kurang, yaitu :
  - 1) Persentase Resiko Bencana pada KRB
  
- ❖ Terdapat **6 (Enam) atau 21.43%** Indikator Kinerja **belum didapatkan capaian kinerjanya** dikarenakan realisasi kinerja masih belum dirilis oleh beberapa Kementerian dan BPS untuk tahun 2021 yaitu :
  - 1) Indeks Reformasi Birokrasi
  - 2) Nilai AKIP
  - 3) Nilai LPPD
  - 4) Opini BPK atas LKPD
  - 5) Rata-rata Capaian Pelayanan Publik
  - 6) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)



Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target kinerja terhadap beberapa indikator kinerja tahun 2021 yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Bupati Indragiri Hilir Tahun 2021 dapat dipenuhi sesuai harapan dengan total tingkat persentase ketercapaian sebesar **86.36 %** atau kategori **Baik**. Namun demikian masih ada beberapa indikator kinerja yang belum diketahui dan belum tercapai. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, perlu dilakukan evaluasi dan pembinaan untuk pencapaian yang lebih baik dimasa mendatang. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir kepada pihak-pihak terkait sebagai stakeholder atau pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan,                      Februari 2021

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

**H. MUHAMMAD WARDAN**



# LAMPIRAN



**PERJANJIAN  
KINERJA**

**BUPATI INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2021**



**BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MUHAMMAD WARDAN  
Jabatan : BUPATI INDRAGIRI HILIR

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tembilahan, 26 Februari 2021

**BUPATI INDRAGIRI HILIR,**  
  
**H. MUHAMMAD WARDAN**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
BUPATI INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2021

No	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021
1	2	3	4	5
1	Memantapkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B
1.1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	1. Nilai AKIP 2. Nilai LPPD 3. Opini BPK atas LKPD	Nilai/ Predikat Nilai Prediket	B Sangat Tinggi WTP
1.2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Keterbukaan Informasi 2. Rata-rata Capaian Pelayanan Publik	Nilai Prediket	80 B
2	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah	1. Persentase peningkatan mobilitas barang dan orang	Persentase	50,00
2.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas	Rata-rata persentase capaian pelayanan infrastruktur wilayah 2. Persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik 3. Persentase panjang jalan	Persentase Persentase Persentase	68,69 60,32 65,74
3	Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam	Laju pertumbuhan PDRB sektor	Persentase	4,44

No	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021
6	Mewujudkan kerukunan,keamanan, ketertiban dan ketenteraman sosial	Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial	Persentase	93
6.1	Terwujudnya stabilitas tranribumlinnas yang kondusif	Angka Pelanggaran Tranribumas Angka Konflik Persentase resiko bencana pada KRB	Angka Angka Persentase	720 1 1,25
7	Meningkatkan penanggulangan tingkat kemiskinan dan Pengangguran	Persentase penduduk miskin	Persentase	7,30
7.1	Meningkatnya Pendapatan Penduduk Miskin	Rata-rata Pendapatan Penduduk Miskin	Perbulan/ Kapita	485.035
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis unggul rakyat sektor	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,49
8.1	Meningkatnya Investasi daerah	Nilai Investasi Daerah	Rp. Milyar	315

Tembilahan, 26 Februari 2021



No	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021
	yang lebih produktif dan berwawasan lingkungan	pertanian,kehu- tanan dan perikanan		
3.1	Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian,Perkebunan ,Perdagangan,Industri dan pariwisata terhadap perekonomian daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	2,276
3.2	Meningkatnya mutu lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,85
4	Mewujudkan SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,08
4.1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing, beriman dan bertaqwa	1. Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 2. Harapan Lama Sekolah	Tahun Tahun	7,38 12,96
4.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,40
5	Meningkatkan Efektivitas Program DMJ Plus Terintegrasi	Persentase desa berstatus Maju dalam IDM terhadap total desa	Persentase	16,95
5.1	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dim pembangunan desa	1. Partisipasi Lembaga Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persentase Indeks	54,65 66,62





# PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Adapun prestasi dan penghargaan yang didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2021, diantaranya:

1. Penghargaan Inovatif Award (IGA) Tahun 2021 dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Kabupaten indragiri Hilir sebagai Kabupaten Sangat Inovatif Tahun 2021.



2. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik "KI AWARDS 2021 merupakan Penghargaan yang diberikan Komisi Informasi Provinsi Riau kepada Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kabupaten Informatif kategori Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau





3. Penganugerahan Meritokrasi 2020 merupakan penghargaan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dari Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Kabupaten Indragiri Hilir dan mendapat prediket Baik.



4. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020.  
Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan Kementrian / Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dinilai telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan "dan perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak.





5. Penghargaan Anugerah Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2021 yang diberikan Ombudsman Republik Indonesia kepada Kabupaten Indragiri Hilir dengan Prediket Kepatuhan Tinggi



6. Penghargaan AKIP Awards 2020 merupakan Penghargaan yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (RB) kepada Kabupaten Indragiri Hilir. AKIP AWARDS adalah penghargaan mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada penganugerahan tersebut, Kabupaten Indragiri Hilir mendapat Prediket B atau Baik.





- Penghargaan Indeks RB 2020 merupakan Penghargaan yang diberikan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (RB) kepada Kabupaten Indragiri Hilir. Penghargaan Indeks RB merupakan penganugerahan terhadap evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada penganugerahan tersebut, Kabupaten Indragiri Hilir mendapat Prediket B atau Baik.



- Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 yang diberikan Gubernur Riau Kepada Kabupaten Indragiri Hilir dengan Prediket Peringkat terbaik II Kategori Kabupaten/Kota.





- Penghargaan Seroja Award diberikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau kepada, Kabupaten Indragiri Hilir. Penghargaan diberikan dengan kategori Ekowisata terpopuler pada Anugerah Pariwisata Riau.



- Penghargaan Pembinaan Kepatuhan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal di Provinsi Riau Tahun 2019 s.d TW III 2021. Penghargaan ini diberikan oleh Gubernur Riau kepada Kabupaten Indragiri hilir dengan Peringkat III se Kabupaten Kota





11. Penghargaan WTP adalah Opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga Negara. Penghargaan WTP 2020 diperoleh Kabupaten Indragiri Hilir dari BPK dengan Prediket Wajar Tanpa Pengecualian



12. Penghargaan Penerapan Standar LPSE Tahun 2021 diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) kepada Kabupaten Indragiri Hilir dalam Penyelenggaraan Sistem Layanan Pengadaan, Penghargaan ini sesuai Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pelayanan secara Elektronik.

